

ISSN 9772774822096



Buletin Litbang

EDISI 09/TAHUN V/2024

Inovasi Mengatasi Stunting



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PALANGKA RAYA

•• Juni 2024



9 772774 822096

Kata Pengantar



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buletin Litbang edisi 09/Tahun V/2024 ini dapat diterbitkan. Buletin ini hadir sebagai media untuk berbagi informasi, kajian, dan inovasi yang dihasilkan melalui kerja keras para peneliti dan pemangku kepentingan yang berkomitmen dalam mendukung pembangunan Kota Palangka Raya.

Buletin ini mengangkat berbagai isu strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Artikel-artikel yang disajikan mencakup beragam topik penting, mulai dari upaya penanggulangan stunting melalui aplikasi Sehat Cerdas, analisis kebijakan pengentasan kemiskinan, pengelolaan sumber daya ikan gabus, hingga strategi pengolahan sampah melalui Pusat Daur Ulang. Selain itu, potensi kekayaan alam Kota Palangka Raya, seperti danau dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mungku Baru, juga menjadi sorotan utama dalam buletin ini.

Kami juga menghadirkan hasil Kajian Partisipasi Publik dalam Penerapan E-government untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Palangka Raya tahun 2024. Kajian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan berbasis bukti, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan inklusif.

Terbitnya buletin ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan seluruh tim yang telah menyusun edisi ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pembaca yang senantiasa mendukung dan memberikan masukan untuk penyempurnaan buletin ini.



Akhir kata, kami berharap buletin ini dapat memberikan wawasan baru, memperkaya pengetahuan, serta menjadi inspirasi bagi semua pihak dalam mewujudkan Kota Palangka Raya yang maju, inovatif, dan berkelanjutan.

Selamat membaca.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PALANGKA RAYA,**



Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750317 199903 1 005

Tim Redaksi

TIM PENYUSUN BULETIN LITBANG KOTA PALANGKA RAYA

Berdasarkan SK Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya

No: 070/316/4/Bapplitbang/II/2024

Penanggung Jawab **Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos, M.AP.**
Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Redaktur **KURNIAWAN S. UTAMA, S.T., M.T.**
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kota Palangka Raya

ROYSART ALFONS, S.T., M.T., M.Sc.
Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda pada Bappedalitbang Kota Palangka Raya

TAMBRIN, S.H.
Peneliti Ahli Muda pada Bappedalitbang Kota Palangka Raya

SUSIANE, S.T.
Peneliti Ahli Muda pada Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Penyunting / Editor **PAJAR YANTO, S.E**
Peneliti Ahli Pertama pada Bappedalitbang Kota Palangka Raya

TRONIKA INA, S.E.
Penyusun Program dan Kreativitas dan Inovasi pada Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
Bappedalitbang Kota Palangka Raya

PRIANTHO, S.E.
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Desain Grafis **MAHTANI SRI SURYANTI, S.P**
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappedalitbang Kota Palangka Raya

HENDRA SAPUTRA, S.Sos.
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Sekretariat..... **SURIANITA, S.H.**
Penyusun Rencana Kerjasama Bappedalitbang Kota Palangka Raya

MARLINA, S.E.
Pengadministrasi Umum Bappedalitbang Kota Palangka Raya

YUNIKO, S.H.
Penyusun Rencana Kerjasama Bappedalitbang Kota Palangka Raya

FATHUL BAHRI
Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Bappedalitbang
Kota Palangka Raya

Alamat Tim Redaksi: Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang
Kota Palangka Raya, Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 No.98 Palangka Raya
Telp: (0536) 3231544 – 3231542 Email: bidanglitbang2020@gmail.com



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
TIM REDAKSI	3
DAFTAR ISI	4
UPAYA ATASI STUNTING MELALUI APLIKASI SEHAT CERDAS KOTA PALANGKA RAYA	5
KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI	12
KAJIAN ANALISIS KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA PALANGKA RAYA	18
PENGELOLAAN SUMBER DAYA INDUK IKAN GABUS DI ALAM	28
PUSAT DAUR ULANG SAMPAH: STRATEGI PENGOLAHAN SAMPAH DI KOTA PALANGKA RAYA	37
POTENSI DANAU KOTA PALANGKA RAYA	44
KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) MUNGKU BARU HADIR SEBAGAI LABORATORIUM ALAM	56
KUNJUNGAN LAPANGAN EKSPEDISI DANAU HANJALUTUNG, DANAU TAHAY DAN DANAU TELUK	61
DANAU OXBOW PESONA ALAM TERSEMBUNYI DALAM LENGKUNGAN SUNGAI	71
KAJIAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024	77
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA	89
HALAMAN UNDUH	105

UPAYA ATASI STUNTING MELALUI APLIKASI SEHAT CERDAS KOTA PALANGKA RAYA

Oleh:

Robby Alexandro, S.Sos

(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bapperida Kota Palangka Raya)



Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan dengan anak sesusianya.

Menurut WHO, seorang anak dikatakan stunting jika panjang atau tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi (SD) dari standar pertumbuhan anak yang telah ditetapkan. Stunting terjadi akibat kondisi kurang gizi yang berlangsung lama, umumnya sejak bayi dalam kandungan hingga usia 2 tahun (1000 Hari Pertama Kehidupan).

Apakah semua balita pendek itu pasti stunting ?

Perlu diketahui bahwa tidak semua balita pendek itu stunting, sehingga perlu dibedakan oleh dokter anak, tetapi anak yang stunting pasti pendek.

Dampak masalah stunting di Indonesia:

1. Dampak Kesehatan

- Gagal tumbuh (berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus), hambatan perkembangan kognitif dan motoric
- Gangguan metabolic pada saat dewasa resiko penyakit tidak menular (diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung, dan lain sebagainya)

2. Dampak ekonomi berpotensi menimbulkan kerugian setiap tahun 2-3 % GDP (sumber data Kemenkes Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan)

Penyebab Stunting

Ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya stunting, antara lain, yaitu :

1. Asupan Nutrisi yang tidak memadai

Penyebab utama stunting adalah asupan

nutrisi yang tidak memadai dalam jangka waktu lama, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hal ini bisa terjadi karena :

- kemiskinan sehingga tidak mampu menyediakan makanan bergizi
- rendahnya pengetahuan ibu tentang pola makan yang baik untuk bayi dan balita
- kurangnya asupan protein hewani, sayur dan buah dalam makanan pendamping ASI (MPASI)
- ketersediaan pangan yang terbatas

2. Infeksi berulang

Anak yang beresiko mengalami infeksi seperti diare, ISPA dan penyakit menular lainnya beresiko lebih tinggi mengalami stunting. Infeksi dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan meningkatkan kebutuhan metabolisme tubuh. Infeksi berulang dapat disebabkan oleh kebersihan diri dan lingkungan yang buruk, tidak mendapatkan imunisasi lengkap dan keterbatasan terhadap akses pelayanan Kesehatan.



Stunting dalam SDG's



3. Penyakit bawaan

Beberapa penyakit bawaan seperti penyakit jantung bawaan, kelainan genetik dan gangguan metabolisme dapat meningkatkan resiko stunting pada anak. Penyakit-penyakit ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak

4. Faktor ibu

Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum dan selama kehamilan juga berperan penting dalam mencegah stunting. Ibu yang mengalami kekurangan gizi kronis, anemia atau infeksi selama hamil beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah dan stunting.

Sustainable Development Goal merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. **17 Tujuan tersebut yaitu:** (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya atasi stunting merupakan Langkah untuk mewujudkan tujuan 3 dari

SDG's yaitu untuk Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2023 yang merupakan prioritas nasional 3 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing". (sumber <https://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/>)

Atasi Stunting Kunci menuju Indonesia Emas 2045

Visi Pemerintah Indonesia untuk menjadikan negara ini sebagai salah satu negara yang paling berkembang dan berdaya saing di dunia pada tahun 2045 nanti, menandai seratus tahun kemerdekaan Indonesia. Ternyata untuk mencapai visi tersebut, banyak tantangan yang harus diatasi, dan salah satu tantangan utamanya adalah stunting.

Oleh karena itu, penanganan stunting menjadi penting dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Upaya untuk mengatasi stunting tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di masa depan. Itu adalah langkah penting menuju pencapaian Visi Indonesia Emas sebagai negara maju pada tahun 2045 (<https://ekon.go.id/publikasi/detail/5196/wujudkan-visi-indonesia-emas-2045-pemerintah-luncurkan-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-rpjpn-2025-2045>).

Mengapa stunting ini menjadi penting ?

Stunting menjadi penting karena dapat mengganggu potensi sumber daya manusia, berdampak pada kesehatan anak-anak, bahkan dapat menyebabkan kematian.

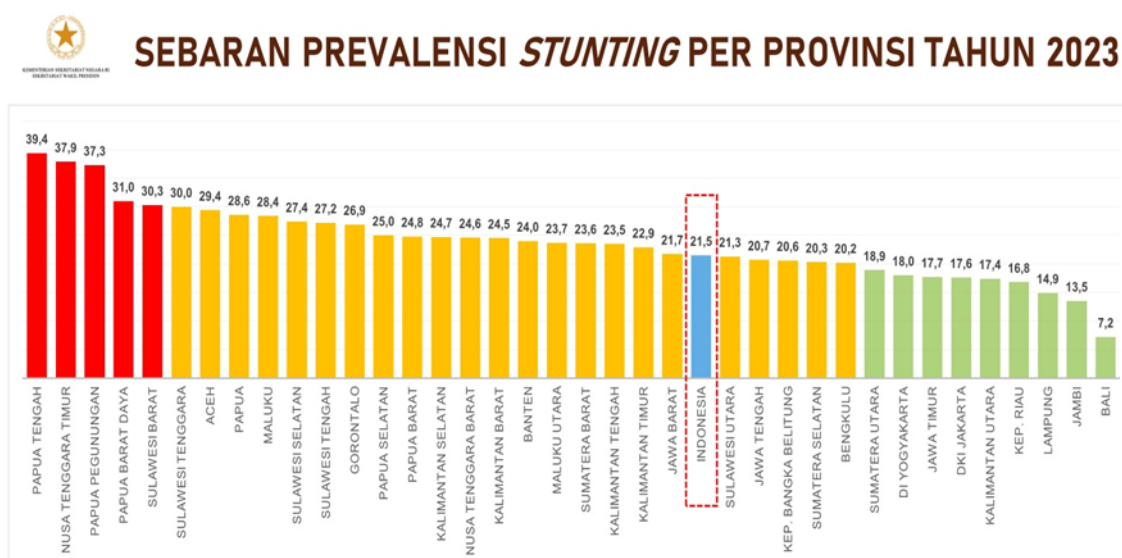


Meskipun terjadi penurunan angka stunting, angka tersebut masih tinggi, dengan WHO menargetkan angka stunting tidak lebih dari 20 persen. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa 54% angkatan kerja mengalami stunting saat bayi, menjadi fokus pemerintah.

Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia menargetkan mengurangi angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Dr. Hasto Wardoyo, Ketua BKKBN, dipercayakan untuk memimpin upaya percepatan penurunan stunting. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi pada bayi, dengan sekitar 1,2 juta bayi lahir dengan kondisi stunting setiap tahun. Bahkan sejak kelahiran, prevalensi stunting mencapai 23%, dan angka ini meningkat menjadi 27,6% akibat faktor-faktor setelah kelahiran. Artinya, stunting adalah masalah serius yang perlu diatasi segera.

Awal tahun 2021, Pemerintah Indonesia menargetkan angka Stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala BKKBN, Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. (K) menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

Dokter Hasto mengatakan angka stunting disebabkan berbagai faktor kekurangan gizi pada bayi. Menurut Hasto di antara 5 juta kelahiran bayi setiap tahun, sebanyak 1,2 juta bayi lahir dengan kondisi stunting. Stunting itu adalah produk yang dihasilkan dari kehamilan. Ibu hamil yang menghasilkan bayi stunting. Saat ini, bayi lahir saja sudah 23% prevalensi stunting. Kemudian setelah lahir, banyak yang lahirnya normal tapi kemudian jadi stunting hingga angkanya menjadi 27,6%. Artinya dari angka 23% muncul dari kelahiran yang sudah tidak sesuai standar.



Jika dilihat sebaran per provinsi, berdasarkan data SKI 2023, sebanyak 9 provinsi telah mempunyai prevalensi di bawah 20%, bahkan 1 provinsi telah di bawah 10%, yaitu Bali (7,2%).

Namun demikian masih ada 5 provinsi yang mempunyai prevalensi di atas 30% (NTT, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat dan Papua Tengah)

Sumber Data: SKI tahun 2023

Angka Prevalensi Stunting Tahun 2023

(<https://www.kominfo.go.id/content/detail/32898/indonesia-cegah-stunting-...>)



Kenaikan dan Penurunan Prevalensi Balita Stunting Per Propinsi *

No	Propinsi	Prev Stunting 2022 (%)	Prev Stunting 2023 (%)	Perubahan Prevalensi 2022-2023	No	Propinsi	Prev Stunting 2022 (%)	Prev Stunting 2023 (%)	Perubahan Prevalensi 2022-2023
1	Papua Tengah	-	39,4	39,4	19	Sulawesi Selatan	27,2	27,4	0,2
2	Papua Pegunungan	-	37,3	37,3	20	Kalimantan Selatan	24,6	24,7	0,1
3	Papua Barat Daya	-	31	31,0	21	Jawa Tengah	20,8	20,7	-0,1
4	Papua	-	28,6	28,6	22	Lampung	15,2	14,9	-0,3
5	Papua Selatan	-	25	25,0	23	Bali	8,0	7,2	-0,8
6	Banten	20,0	24	4,0	24	Kalimantan Timur	23,9	22,9	-1,0
7	Gorontalo	23,8	26,9	3,1	25	Sulawesi Tengah	28,2	27,2	-1,0
8	DKI Jakarta	14,8	17,6	2,8	26	Jawa Timur	19,2	17,7	-1,5
9	Nusa Tenggara Timur	35,3	37,9	2,6	27	Sumatera Barat	25,2	23,6	-1,6
10	Sulawesi Tenggara	27,7	30	2,3	28	Aceh	31,2	29,4	-1,8
11	Maluku	26,1	28,4	2,3	29	Sumatera Utara	21,1	18,9	-2,2
12	Kepulauan Bangka Belitung	18,5	20,6	2,1	30	Maluku Utara	26,1	23,7	-2,4
13	Sumatera Selatan	18,6	20,3	1,7	31	Kalimantan Barat	27,8	24,5	-3,3
14	DI Yogyakarta	16,4	18	1,6	32	Riau	17,0	13,6	-3,4
15	Jawa Barat	20,2	21,7	1,5	33	Kalimantan Tengah	26,9	23,5	-3,4
16	Kepulauan Riau	15,4	16,8	1,4	34	Jambi	18,0	13,5	-4,5
17	Sulawesi Utara	20,5	21,3	0,8	35	Sulawesi Barat	35,0	30,3	-4,7
18	Bengkulu	19,8	20,2	0,4	36	Kalimantan Utara	22,1	17,4	-4,7
					37	Papua Barat	30,0	24,8	-5,2
					38	Nusa Tenggara Barat	32,7	24,6	-8,1

* 6 propinsi merupakan daerah otonomi baru (DOB) Papua
 • SSGI 2022 tidak dilakukan di Prop NTT

(<https://www.kominfo.go.id/content/detail/32898/indonesia-cegah-stunting-...>)

Angka prevalensi Stunting secara nasional Indonesia Tahun 2023 sebesar 21,5% turun 0,1 % dari tahun 2022 sebesar 21,6 %, untuk Kalimantan Tengah prevalensi Stunting sebesar 23,5 % turun 3,4 % dari

tahun 2022 sebesar 26,9 % sedangkan untuk Kota Palangka Raya angka prevalensi Stunting untuk tahun 2023 sebesar 28 % dari tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar 27,8 % angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,2 %.

Prevalensi Stunting Kab/Kota di Prov. Kalteng (Hasil SSGI dan SKI)

Kabupaten/Kota	Capaian 2021 (Hasil SSGI)	Target 2022	Capaian 2022 (Hasil SSGI)	Target 2023	Capaian 2023 (Hasil SKI)*	Target 2024	Capaian 2024
Kotawaringin Barat	23,4	19,04	21,1	15,75	17,9 ↓	12,49	
Kotawaringin Timur	32,5	26,62	27,9	22,17	35,5 ↑	17,71	
Kapuas	25,0	20,81	20,21	17,60	16,2 ↓	14,29	
Barito Selatan	31,4	26,09	35,6	22,05	23,9 ↓	17,88	
Barito Utara	28,3	23,57	19,6	19,95	15,3 ↓	16,21	
Sukamara	24,7	19,80	21,8	16,14	29,1 ↑	12,63	
Lamandau	23,2	18,91	25,5	15,68	13,2 ↓	12,47	
Seruyan	29,3	23,51	34,7	19,18	25,8 ↓	15,02	
Katingan	29,3	24,18	29,9	20,29	34,0 ↑	16,33	
Pulang Pisau	24,6	20,59	31,6	17,51	24,0 ↓	14,29	
Gunung Mas	35,9	29,42	17,6	24,49	12,9 ↓	19,58	
Barito Timur	33,7	27,52	26,9	22,85	21,7 ↓	18,19	
Murung Raya	31,8	26,01	40,9	21,63	21,0 ↓	17,26	
Kota Palangka Raya	25,2	19,94	27,8	16,05	28,0 ↑	12,39	
Kalimantan Tengah	27,4	23,24	26,9	19,30	23,5	15,38	

Sumber: Balitbang Kemenkes

*Sumber: BKPK Kemenkes RI

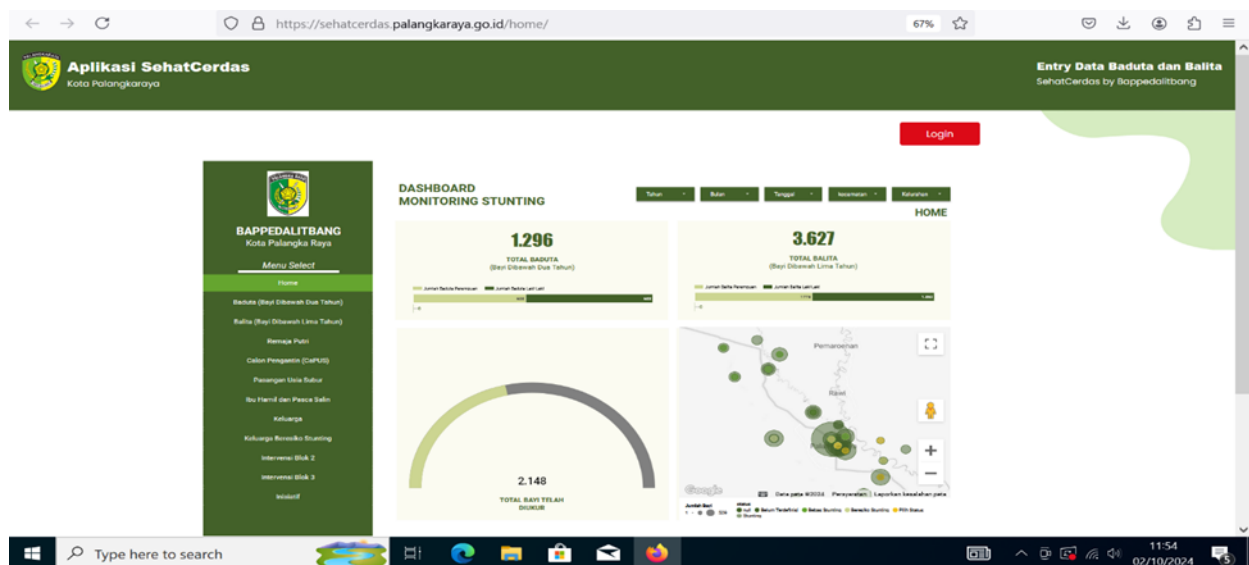
Jika melihat dari angka tersebut kenaikan angka prevalensi stunting Kota Palangka Raya menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dalam upaya mewujudkan target nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dimana target prevalensi diharapkan bisa mencapai 14 % pada tahun 2024 sebagai target antara (pasal 5 ayat 1).

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut ditemukan kendala di lapangan untuk mendapatkan data stunting yang dapat diakses oleh masyarakat dan para stakeholder yang membutuhkan data

tersebut. Dimana data stunting selama ini hanya bisa didapatkan melalui data e-pggbm Dinas Kesehatan melalui puskesmas yang ada di Kota Palangka Raya. Namun untuk pengaksesan ke masyarakat dan untuk perangkat daerah masih terbatas.

Melihat hal tersebut dalam upaya untuk **memenuhi akses data stunting** yang dapat diakses oleh masyarakat, stakeholder dan perangkat daerah yang ada maka Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Palangka Raya membuat aplikasi Sehat Cerdas.

Aplikasi Sehat Cerdas bukan hanya dapat diakses datanya namun juga dapat



menjadi bahan bagi perangkat daerah untuk melakukan intervensi baik spesifik maupun sensitive dalam penanganan stunting. Link aksesnya berbasis web dengan alamat akses <https://sehatcerdas.palangkaraya.go.id/home/>

Di bawah ini data tampilan aplikasi Sehat Cerdas Kota Palangka Raya yang mencakup 5 wilayah Kecamatan dan 30

Kelurahan yang ada di Kota Palangka Raya dimana dalam pemanfaatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berguna inginkan.

Namun dalam perkembangannya aplikasi ini **masih belum terintegrasi dengan aplikasi e-pggbm Kemenkes** sehingga data balita yang ada masih perlu diinput. Untuk penginputan data sementara sebagai

database awal dilakukan oleh Bapperida Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan menarik data dari puskesmas yang ada di Kota Palangka Raya dari data bulan Juni Tahun 2024. Ke depannya diharapkan dapat dibantu oleh Kader Posyandu yang ada di Kota Palangka Raya dan oleh aparaturnya yang ada di Kota Palangka Raya.

Dalam perkembangan penggunaan aplikasi tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Palangka Raya telah melakukan Sosialisasi terkait pemanfaatan aplikasi tersebut di Aula Rahan Pumpung Kapakat Bapperida Kota Palangka Raya dari hari tanggal 13-19 Juni 2024 yang diberikan kepada Kader Posyandu dan aparaturnya

Kelurahan yang ada se-Kota Palangka Raya.

Dalam sosialisasi, sekaligus dilakukan pelatihan penginputan data yang dilakukan oleh Kader Posyandu se-Kota Palangka Raya yang dijadwalkan dan dibagi dalam 5 wilayah Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya.

Harapan ke depannya Aplikasi Sehat Cerdas ini dapat terintegrasi dengan aplikasi e-pggbm Kemenkes dan dapat di-*update* oleh Kader Posyandu dalam upaya memenuhi kelengkapan data prevalensi Balita Stunting Kota Palangka Raya yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menentukan arah kebijakan Kota Palangka Raya ke depannya.

* * *



Foto bersama peserta Sosialisasi Penginputan Satu Data Stunting Aplikasi Sehat Cerdas di Aula Rahan Pumpung Kapakat Bappedalitbang Kota Palangka Raya



Oleh:
Kurniawan S. Utama, S.T., M.T.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Konsep Kebijakan Berbasis Bukti atau *Evidence Based Policy* (EBP) meskipun bukan konsep yang sangat baru, tetapi telah mendapatkan perhatian yang cukup besar selama dua

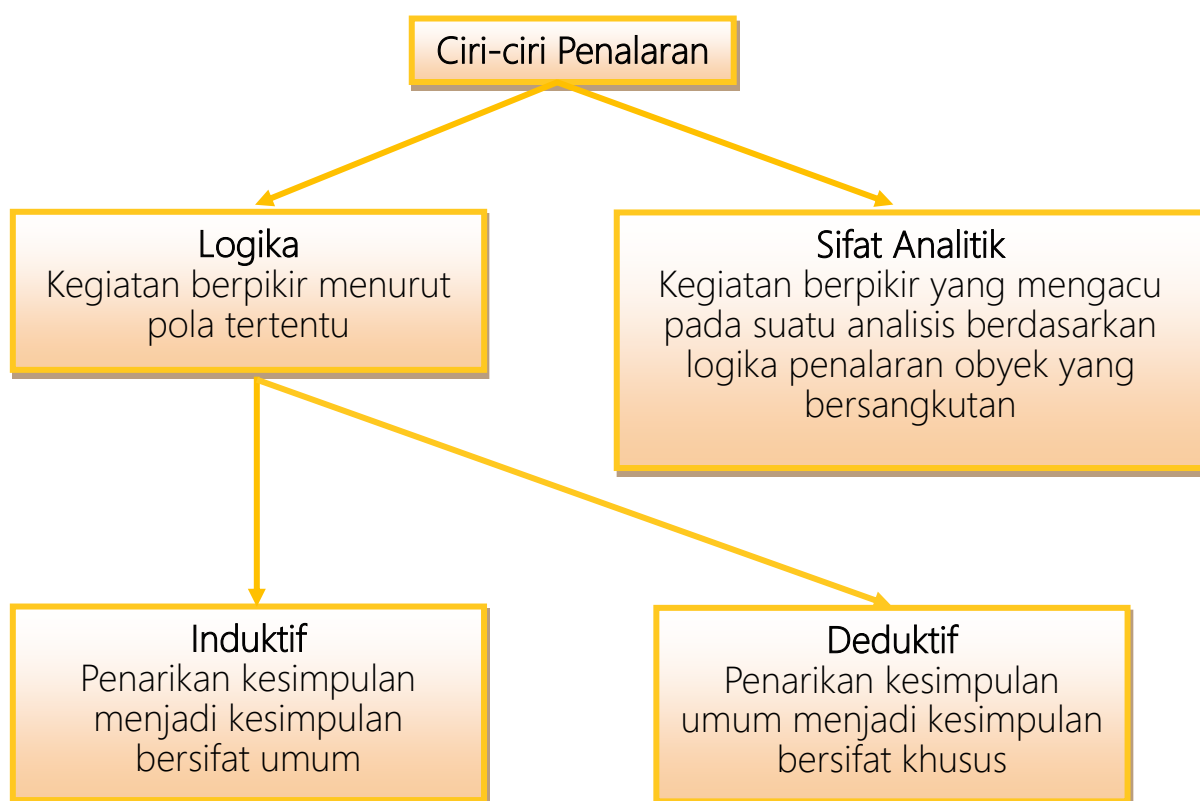
dekade terakhir. Paradigma pengambilan kebijakan berbasis bukti sendiri baru mulai marak tahun 1997 yang dipopulerkan oleh Perdana Menteri Inggris, Tony Blair yang berkeinginan untuk mengeluarkan ideologi dan politik dalam proses pengambilan

kebijakan. Secara umum EBP adalah menggambarkan bukti yang berasal dari data dan hasil riset untuk mempengaruhi pembuat kebijakan mengenai apa yang akan dikerjakan dan selanjutnya menghasilkan *outcome* kebijakan yang baik. EBP menekankan pada pencapaian hasil berdasarkan data dan hasil riset sehingga terciptalah efisiensi dan efektifitas dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pada umumnya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi kepentingan dan kebutuhan yang timbul di setiap masyarakat tidaklah sama sehingga ada banyak kepentingan yang harus diakomodasi oleh Pemerintah. Untuk itu, Pemerintah dituntut memiliki kebijakan yang paling prioritas di antara beberapa pilihan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Definisi Evidence Based Policy (EBP)

Berbagai sumber mengemukakan pengertian EBP dengan sudut pandangnya masing-masing. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), EBP merupakan kebijakan yang ditetapkan dengan berdasarkan pada data dan fakta. Menurut *The Pew Charitable Trust* dan *Mac Arthur Foundation* (2014), EBP adalah kebijakan yang memanfaatkan penelitian dan informasi terbaik yang tersedia tentang hasil program untuk memastikan keputusan di semua tahapan proses berdasarkan pada bukti yang diterapkan di setiap unit pemerintahan. Lasswel dalam ilmu kebijakan publik menjelaskan teori yang meliputi metode penelitian proses kebijakan, hasil dari studi kebijakan, dan hasil temuan penelitian yang berkontribusi dalam penyesuaian kebutuhan-kebutuhan di era saat ini. Teori Laswell dapat mendorong para aktor kebijakan dalam proses perumusan



Gambar 1. Ciri-ciri Berpikir Ilmiah

kebijakan harus mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan yang ada karena pada dasarnya kebijakan dibuat sebagai tindakan untuk mengatasi masalah yang terjadi.

Dasar berpikir EPB adalah berpikir secara nalar dan ilmiah terhadap suatu masalah. Ciri-ciri berpikir ilmiah yang dapat dilihat gambar 1 di atas.

Data dan Hasil Riset Sebagai Landasan EBP

Penggunaan data dan hasil riset sebagai landasan konsep EBP menjadi mutlak. Negara-negara maju sudah mengadopsi kebijakan pembangunan berbasis bukti yang berhasil menciptakan pengaruh yang luar biasa. Sedangkan negara berkembang masih gagap dalam menggunakan data dan hasil riset untuk mendukung kebijakan yang akhirnya membuat hasil kebijakan menjadi kurang efektif. Hambatan dalam menggunakan data dan hasil riset di negara berkembang karena kurangnya data dan hasil riset tersedia. Selain itu masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia untuk membaca dan menginterpretasikan data dan hasil riset dalam proses pengambilan kebijakan. Menurut Hasbullah 2018, ketertinggalan pemahaman makna yang mendasari pengetahuan yang ada mulai merambat di ranah masyarakat sipil, intelektual, administratif dan legislatif. Bahkan, terkadang data dan hasil riset yang ada tidak bekerja



Sumber:
<https://bpsdm.kemendagri.go.id/berita/page/663>

sebagaimana mestinya yakni tidak relevan dan searah.

Bagaimana dengan Indonesia

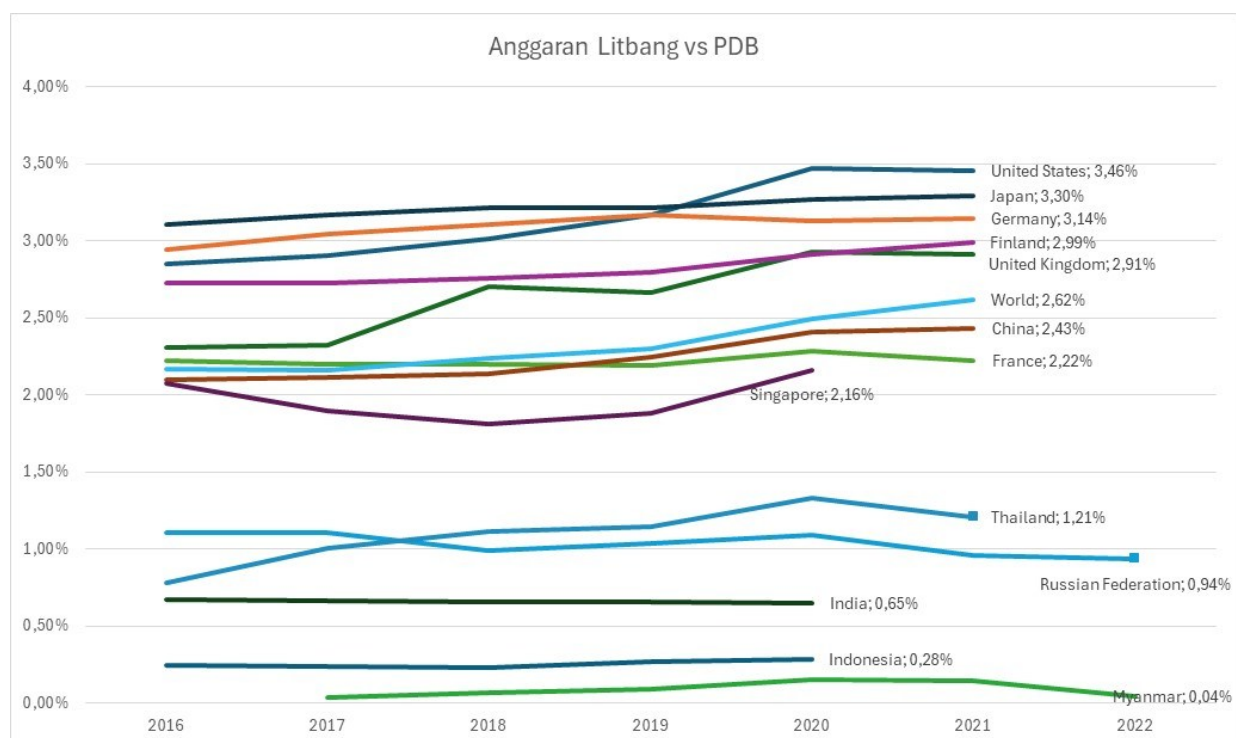
Menelurkan kebijakan berdasarkan bukti (EBP) dengan data dan hasil riset yang dapat dipertanggungjawabkan tidaklah mudah, butuh waktu dan proses yang kompleks, sedangkan pekerjaan untuk menghasilkan bukti itu sendiri tidak kalah rumitnya. Dimana tidak semua data dan hasil riset memiliki kualitas yang memadai sebagai sumber data dan informasi bagi proses penyusunan kebijakan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam menghasilkan penelitian di Indonesia.

1. Sumber Daya

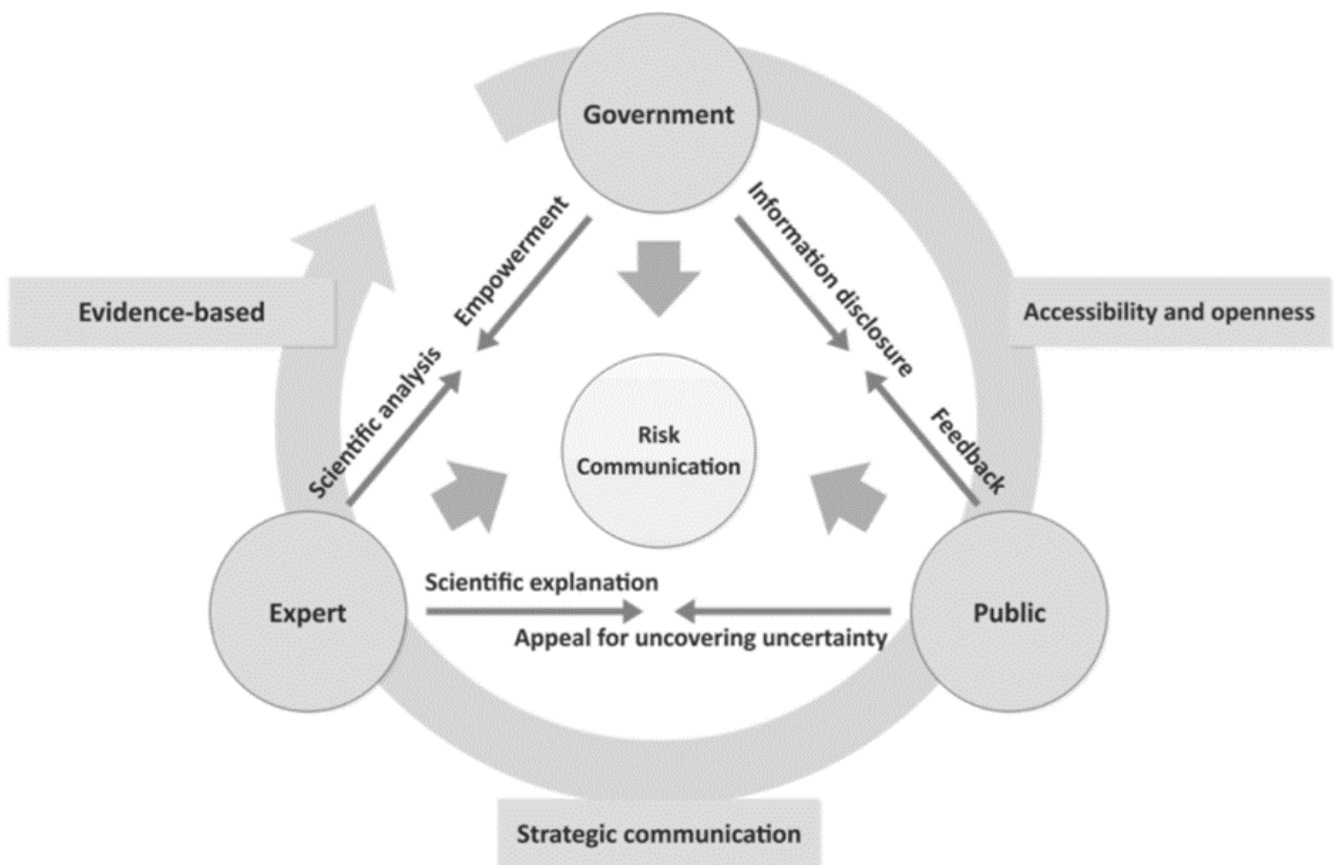
Keterbatasan sumber daya baik manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana selalu menjadi permasalahan klasik dalam berbagai hal di Indonesia, termasuk dalam hal menghasilkan data dan hasil riset. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan infrastruktur yang tidak merata menyebabkan ada beberapa wilayah yang sulit dijangkau sehingga menjadikan kendala tersendiri, sedangkan kebijakan idealnya harus mampu mengakomodir kepentingan dan kebutuhan seluruh warga negara Indonesia. Di samping itu dengan sistem desentralisasi, dimana ada pembagian kewenangan yang menuntut kebijakan dibuat oleh Pusat dan Daerah, tentu akan sulit untuk menstandarkan kualitas kebijakan yang sama antar daerah bila melihat tingkat kemajuannya yang berbeda, terlebih bila dibandingkan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Permasalahan lain yang juga banyak dialami negara berkembang pada umumnya adalah kesulitan dalam menjamin pembiayaan. Di Indonesia masih sangat minim nilainya masih berkisar 0,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia dalam posisi paling bawah di ASEAN. Bandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika yang mengalokasikan anggarannya sebesar 2,7 %, Jerman 2,85 %, Singapura dan Thailand 2,5 %, Jepang 3,4 % dan Taiwan 2,35 %.

Dengan kondisi tersebut, tantangan penelitian bukan hanya bagaimana menghasilkan penelitian yang berkualitas, namun tepat guna dan efisien dalam penggunaan anggaran, padahal di sisi lain kegiatan penelitian membutuhkan biaya yang besar, khususnya ketika penelitiannya menuntut metodologi yang lebih akurat.



Sumber: <https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?end=2022&start=2016>
(diolah)



EBP dan Skema Komunikasinya (Zhang dkk, 2020)

2. Ketersediaan Data

Keberadaan Badan Pusat Statistik (BPS) memang sangat membantu bagi ketersediaan data, demikian pula dengan data-data statistik seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik yang dihasilkan oleh kementerian terkait, namun sejauh ini informasi publik yang seharusnya disediakan di sebuah situs jaringan resmi, pada kenyataannya statistik tersebut bisa jadi sangat sulit diakses. Pun ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah diberlakukan. Di samping itu dalam proses pengumpulan data sering dihadapkan pada birokrasi yang tidak perlu, pemenuhan persyaratan administratif yang memakan

waktu lama sehingga menghambat, untuk itu dibutuhkan upaya untuk memangkas birokrasi.

Persoalan data yang lain adalah Indonesia belum memiliki sistem yang mampu menyediakan data secara komprehensif dan lengkap baik dari aspek time series (waktu) maupun aspek substansi (bidang/sektor), hal tersebut sering menyulitkan para pengambil kebijakan ketika dituntut untuk menghasilkan kebijakan secara cepat dan mendesak, namun harus berdasarkan bukti yang valid dan relevan. Sumber data yang secara tunggal dilegitimasi oleh negara untuk dipakai sebagai dasar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan

juga belum ada, hanya penggunaan data peta tunggal saja yang telah dikukuhkan sah secara hukum, dimana akselerasinya telah diupayakan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

3. Hasil Penelitian dan Kebutuhan Kebijakan

Menghasilkan penelitian sebagai bukti kebijakan memang sangat penting, namun yang tidak kalah penting adalah peneliti harus mampu mengajukan pertanyaan penelitian yang tepat, sehingga hasil-hasil penelitian menjadi aplikatif, sesuai dengan kebutuhan dan logika berfikir para pembuatan kebijakan.

Permasalahan yang ada saat ini adalah tidak *inline*-nya topik-topik penelitian yang dihasilkan dengan kebutuhan para perumus kebijakan yang disebabkan kurangnya komunikasi dan koordinasi lembaga penyedia penelitian dan pengguna penelitian, sehingga hasil-hasil penelitian menjadi tidak aplikatif dan tidak bermanfaat secara luas. Dengan kondisi tersebut, antara permintaan dan penawaran penelitian tidak dapat bertemu dalam suatu titik keseimbangan. Jika pembuat kebijakan diajak berdiskusi tentang pandangan dan kebutuhannya, dan dilibatkan sejak proses awal penelitian, maka akan ada keterkaitan dengan penelitian tersebut dan hasilnya berpeluang besar untuk digunakan dalam perumusan kebijakan.

4. Bahasa Penelitian dan Bahasa Kebijakan

Salah satu persoalan yang menghambat dijadikannya hasil penelitian sebagai bukti bagi penyusunan kebijakan

adalah bahasa penelitian yang ilmiah tidak dapat secara mudah dan tepat dituangkan oleh pembuat kebijakan dalam norma kebijakan. Meskipun dalam beberapa topik, penelitian yang memadai sudah tersedia, penelitian tersebut tidak akan digunakan di kalangan pembuat kebijakan jika isinya tidak dapat dipahami. Untuk itu, bahasa penelitian hendaknya diterjemahkan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan diterapkan oleh pembuat kebijakan.

Lembaga penelitian perlu membangun jaringan dengan birokrasi. Peneliti harus memiliki kemampuan menerjemahkan hasil-hasil penelitian agar sesuai dengan logika pembuat kebijakan sebab hasil penelitian tidak dapat serta merta langsung diimplementasikan. Para birokrat pengambil kebijakan mempunyai logika berfikir yang berbeda, sehingga harus ada pihak yang mampu menerjemahkan dan mendesain hasil-hasil penelitian ke dalam bahasa birokrasi agar dapat dituangkan dalam norma-norma kebijakan.

* * *



Kajian Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palangka Raya

Oleh:

SURIANTA, S.H., Penyusun Rencana Kerjasama dan Kelembagaan Bappedalitbang Kota Palangka Raya
TAMBRIN, S.H., Peneliti Ahli Muda Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dalam Tahun Anggaran 2024 melaksanakan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya untuk melaksanakan Kajian Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Palangka Raya. Kajian ini dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Palangka Raya, khususnya untuk menyediakan dasar dalam penentuan langkah kebijakan selanjutnya.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi kemiskinan di Kota Palangka Raya?

2. Bagaimana *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palangka Raya?
3. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Kota Palangka Raya?
4. Bagaimana rekomendasi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kota Palangka Raya?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari Kajian ini adalah:

1. Menganalisis bagaimana klasifikasi kemiskinan di Kota Palangka Raya?
2. Menganalisis *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palangka Raya?
3. Mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Kota Palangka Raya?



Gambar 1. Pendataan penduduk di Kelurahan Kameloh Baru oleh Tim dari Bappedalitbang Kota Palangka Raya

4. Merumuskan rekomendasi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kota Palangka Raya

Adapun manfaat yang diharapkan adalah melalui kajian ini dapat diketahui perihal terkait kemiskinan di Kota Palangka Raya, termasuk bentuk dan jenis kemiskinan. Bagi Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan hasil kajian ini memberikan acuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui referensi yang diberikan, terutama *collaborative* pengentasan kemiskinan, klasifikasi serta faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Kolaboratif Stakeholders (Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Komunitas Masyarakat, dan Media)

Kebijakan pengentasan kemiskinan memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki peran sentral dalam merumuskan strategi. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, keterlibatan pihak swasta sangatlah penting. Pihak swasta dapat memberikan sumber daya dan inovasi dalam pelaksanaan program. Sehingga, kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadi kunci keberhasilan.

Perguruan tinggi juga memegang peranan penting dalam pengentasan kemiskinan. Melalui riset dan pengembangan, mereka dapat memberikan data dan analisis yang diperlukan untuk kebijakan.

Komunitas masyarakat adalah garda terdepan dalam implementasi kebijakan.



Gambar 2. Pendataan penduduk di Kelurahan Kameloh Baru oleh Tim dari Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Mereka memahami kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat secara langsung.

Media memiliki peran yang tidak kalah penting dalam kolaborasi ini. Media mampu menyebarkan informasi tentang program pengentasan kemiskinan ke masyarakat luas.

Tantangan dalam kolaborasi harus dihadapi dengan bijak. Terkadang terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan antara pihak. Komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif sangat diperlukan untuk meredakan ketegangan. Ketika masalah muncul, solusi bersama dapat dicari untuk menemukan titik temu. Ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan

komitmen dari semua pihak.

Kesimpulannya, kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi, komunitas, dan media sangat vital. Masing-masing pihak membawa sumber daya dan keahlian yang memperkuat upaya kolektif. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, pengentasan kemiskinan dapat dicapai dengan lebih efektif. Sinergi ini mengarah pada penciptaan peluang yang lebih baik untuk setiap individu. Melalui kerja sama, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi masyarakat.

B. Keinginan Warga

Penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Kameloh Baru telah

mengidentifikasi bahwa keinginan masyarakat terkait pengentasan kemiskinan yakni dengan fokus pada pentingnya perbaikan infrastruktur jalan, hal tersebut menurut warga setempat sebagai langkah awal yang dianggap krusial. Pada setiap pembangunan suatu kawasan, infrastruktur jalan selalu menjadi prioritas utama, akses jalan satu cara untuk memudahkan aktivitas warga dalam menjalani dan mencari kehidupan sehari-hari. Pada penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa mayoritas warga menganggap perbaikan infrastruktur jalan harus menjadi prioritas utama jika ingin melaksanakan program pengentasan kemiskinan di Kelurahan Kameloh Baru.

Masyarakat meyakini perbaikan jalan sebagai solusi fundamental yang dapat memfasilitasi akses ke pasar, layanan publik, dan peluang ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Perbaikan infrastruktur jalan tidak hanya akan meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas, tetapi juga akan membuka jalan bagi pembangunan ekonomi yang lebih merata dan inklusif.

C. Rekomendasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Kameloh Baru

Untuk mengatasi tantangan kemiskinan yang ada di Kelurahan Kameloh Baru, diperlukan pendekatan kebijakan yang holistik dan terfokus. Berdasarkan penelitian



Gambar 3. Pendataan penduduk di Kelurahan Kameloh Baru

yang dilakukan, berikut analisis beserta rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk pengentasan kemiskinan di Kelurahan Kameloh Baru.

1. Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Dasar
2. Peningkatan Akses terhadap Layanan Pendidikan dan Kesehatan
3. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Penciptaan Lapangan Kerja
4. Pemberdayaan Komunitas dan Partisipasi Masyarakat
5. Pengembangan Program Jaminan Sosial

D. Rekomendasi Model Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Kameloh Baru **Brand Model Pengentasan Kemiskinan yang Berkarakter pada Pemberdayaan Masyarakat**

Untuk membangun model pengentasan kemiskinan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif. Brand model ini perlu mencerminkan nilai-nilai utama seperti kemandirian, partisipasi aktif, dan keberlanjutan, serta mampu menginspirasi perubahan positif di tengah masyarakat. Pada bagian ini akan direkomendasikan sebuah konsep yang dapat dijadikan acuan atau alternatif dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Kameloh Baru. Berikut adalah konsep brand model pengentasan kemiskinan yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat:
Nama Brand: "Sinergi Sejahtera"

1. Visi Misi dan Tagline

⇒ **Visi:** Mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan sejahtera melalui pemberdayaan komunitas dan pengembangan potensi lokal.

⇒ **Misi:** Memberdayakan masyarakat miskin dengan meningkatkan keterampilan, akses terhadap sumber daya, dan peluang ekonomi. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, komunitas masyarakat dan media dalam program pengentasan kemiskinan. Membangun komunitas yang mandiri dan berkelanjutan melalui partisipasi aktif dalam pembangunan lokal.

⇒ **Tagline:** Bersama Membangun Kemandirian" mencerminkan semangat kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan.

2. Pilar Utama Brand:

a. Kemandirian Ekonomi

Pelatihan Keterampilan, Akses Modal, Pengembangan UMKM, Inklusi Sosial , Koperasi Berbasis Komunitas

b. Keberlanjutan dan Lingkungan

Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, Ekowisata dan Budaya Lokal, Kesadaran Lingkungan

3. Strategi Implementasi Brand Model

a. Program Pengembangan Komunitas:

Program ini melibatkan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan penguatan kapasitas komunitas dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

b. Kemitraan dan Kolaborasi:

Membangun kemitraan strategis dengan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas masyarakat dan media untuk memperkuat program pemberdayaan dan meningkatkan skala dampak yang dicapai.



Gambar 4. Pelaksanaan Seminar Akhir Kajian di Ruang Rapat Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota pada tanggal 21 Agustus 2024 dipimpin oleh Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya

c. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data:

Implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan berbasis data untuk memastikan setiap program mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang diinginkan.

4. Keunikan dan Diferensiasi

Pendekatan Holistik: Sinergi Sejahtera tidak hanya fokus pada bantuan finansial tetapi juga pada peningkatan keterampilan, pendidikan, dan kesadaran lingkungan, sehingga menciptakan dampak jangka panjang.

Partisipasi Komunitas: Program-programnya dirancang dengan pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahap proses, memastikan relevansi dan keberhasilan program.

Berbasis Kearifan Lokal: Brand ini menonjolkan keunikan dan potensi lokal dari budaya hingga sumber daya alam, sebagai kekuatan untuk pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Brand model Sinergi Sejahtera menghadirkan pendekatan inovatif dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Kameloh Baru melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan mengedepankan kemandirian, partisipasi aktif, dan keberlanjutan, brand ini berusaha untuk menciptakan perubahan positif di tingkat komunitas. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan pemanfaatan potensi lokal, Sinergi Sejahtera bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri, serta menginspirasi wilayah lain untuk mengadopsi pendekatan serupa.

PENUTUP

A. Kondisi Real Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan di banyak daerah, terutama di wilayah pinggiran kota, pedesaan dan daerah tertinggal, sering kali disebabkan oleh dua faktor utama yaitu belum optimalnya program pemberdayaan dan keterbatasan sumber daya alam yang tersedia. Analisis terhadap kedua faktor ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi real penyebab kemiskinan di Kelurahan Kameloh Baru. Berikut analisisnya:

1. Belum Optimalnya Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya utama dalam mengentaskan kemiskinan. Namun, dalam implementasi, program-program dalam pemberdayaan masyarakat seringkali belum optimal. Banyak program pemberdayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Misalnya, pelatihan keterampilan atau bantuan usaha yang ditawarkan sering kali tidak sesuai dengan potensi lokal atau kondisi pasar. Akibatnya, program tersebut tidak dapat mengangkat ekonomi masyarakat secara signifikan. Dalam program pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting. kurangnya partisipasi masyarakat dapat terjadi akibat dari program pemberdayaan yang dirancang dan dijalankan secara *top-down*, tanpa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini mengakibatkan program-program tersebut tidak diterima dengan baik oleh masyarakat, atau masyarakat tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap program tersebut.

2. Kurangnya Sumber Daya Alam yang Memadai

Selain masalah dalam program pemberdayaan, keterbatasan sumber daya alam juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kelurahan Kameloh Baru. Beberapa dampak dari kurangnya sumber daya alam terhadap kemiskinan di Kelurahan Kameloh Baru seperti minimnya potensi ekonomi lokal. Kelurahan Kameloh Baru sebagai daerah yang kurang memiliki sumber daya alam, seperti tanah subur, hasil tambang, atau potensi pariwisata, memiliki kesulitan untuk mengembangkan ekonomi lokal. Tanpa sumber daya alam yang memadai, masyarakat sulit untuk menemukan sektor-sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber penghasilan utama. Selanjutnya, dampak dari kurangnya sumber daya alam menyebabkan keterbatasan infrastruktur pendukung. Kelurahan Kameloh Baru sebagai sebuah daerah dengan sumber daya alam yang minim, maka pembangunan infrastruktur tentu juga akan tertinggal. Jalan yang buruk, kurangnya akses air bersih, keterbatasan akses kesehatan dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengembangkan usaha produktif.

B. Program dan hasil

Beberapa program dan hasilnya yang telah dilaksanakan di Kelurahan Kameloh Baru, sebagai lokus kajian, terkait pengentasan kemiskinan, sebagai berikut.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palangka Raya. Kelurahan Kameloh Baru menghadapi tantangan serius terkait kondisi

alam, khususnya genangan air dan banjir saat musim hujan. Masalah ini tidak hanya mengganggu kehidupan sehari-hari warga, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan jalan di Kelurahan Kameloh Baru sudah pernah dilakukan, namun kuatnya banjir dapat merusak jalan tersebut. Di samping itu, anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan cukup besar sehingga butuh proses dan waktu yang agak lama untuk pembangunan jalan di wilayah tersebut. Pada akhir tahun 2024 direncanakan pembangunan jalan di wilayah Kelurahan Kameloh Baru Kota Palangka Raya.

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya. Program Bantuan Sembako dilaksanakan penyalurannya setiap dua Triwulan. Berdasarkan data terakhir telah disalurkan kepada 242 Kepala Keluarga. Selain itu, Dinas Sosial Kota Palangka Raya juga memberikan program UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Kameloh Baru. Penyaluran program UEP dilakukan berupa bantuan kepada warga sasaran sebagai bantuan modal. Adapun nominalnya yaitu Rp 2.500.000,- sebagai modal awal. Meskipun terhitung kurang cukup tetapi dianggap sudah memadai mengingat bantuan ini merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya. Pembangunan Infrastruktur dasar direncanakan pelaksanaannya pada triwulan 4 Tahun 2024. Program lainnya berupa Bedah Rumah Tidak Layak Huni untuk

sebanyak 8 KK. Selain itu juga akan dilaksanakan program pembangunan jembatan titian yang menghubungkan RT 1 sampai dengan RT 2, dan rencana pembangunan 1 menara untuk air bersih. Dalam hal ini pembangunan dilaksanakan berkoordinasi dengan pihak TNI.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya melaksanakan program kerja berupa pembinaan dan pelatihan. Selain itu, Kelurahan Kameloh Baru sebagai binaan kampung KB oleh Dinas Pengendalian Penduduk menerima bantuan bibit ayam. Bibit ayam yang diberikan pada tahun 2023 udah berhasil dan sudah bertelur.

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Program pengentasan kemiskinan di Kelurahan Kameloh Baru berupa pembebasan pakaian seragam atau pembayaran di sekolah. Selain di Kelurahan Kameloh Baru, program yang sama juga dilaksanakan pada beberapa wilayah lainnya di Kota Palangka Raya.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya. Beberapa intervensi yang dilaksanakan adalah bantuan untuk pelaku UKM, pembinaan koperasi berupa pendampingan dan penjelasan tentang manfaat koperasi.

Dinas Perikanan Kota Palangka Raya. Intervensi yang dilakukan di Kelurahan Kameloh Baru berupa pemberian bantuan alat tangkap ikan, Karamba. Tujuan pemberian bantuan tersebut untuk memberdayakan nelayan dengan

menyediakan alat-alat tangkap, juga yang lebih modern dan efisien, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan hasil tangkapan. Dengan adanya karamba, masyarakat dapat mengelola sumber daya ikan dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun, tantangan yang dihadapi adalah pemeliharaan dan manajemen karamba secara berkelanjutan. Dinas Perikanan Kota Palangka Raya perlu memastikan bahwa para penerima bantuan karamba memiliki akses ke pelatihan yang memadai dalam hal manajemen budidaya, pengendalian kualitas air, dan pencegahan penyakit ikan. Tanpa dukungan teknis yang berkelanjutan, hasil dari bantuan karamba mungkin tidak akan optimal. Sedangkan pada rencana program pengolahan hasil perikanan melalui UMKM, Dinas Perikanan juga menunjukkan komitmen dalam meningkatkan nilai tambah hasil perikanan melalui dukungan terhadap UMKM pengolahan ikan. Program ini memiliki dampak positif yang sangat besar dalam menciptakan diversifikasi ekonomi di sektor perikanan. Dengan mendukung UMKM, hasil tangkapan ikan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah seperti ikan asap, abon ikan, atau kerupuk ikan, juga Amplang. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor pengolahan

Terakhir, dari Kelurahan Kameloh baru sendiri menyampaikan bahwa masyarakat Kelurahan Kameloh Baru memang masih dalam kategori miskin, tetapi

yang masuk miskin ekstrim sudah mulai berkurang dan masih ada delapan KK. Adapun di antara Perangkat Daerah yang telah melaksanakan program di Kameloh Baru adalah Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Bappedalitbang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Pendidikan. Di antara program yang sudah dilaksanakan yaitu pengembangan ekonomi masyarakat melalui pembibitan kahui, dan bantuan ayam kampung.

C. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai kebijakan pengentasan kemiskinan di Kelurahan Kameloh Baru menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya dari pemerintah daerah untuk mengurangi angka kemiskinan, tantangan besar masih terus ada. Beberapa kebijakan yang diterapkan, seperti bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan infrastruktur, telah memberikan dampak positif bagi sebagian warga. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa keberhasilan kebijakan-kebijakan tersebut belum maksimal.

Salah satu temuan utama adalah bahwa beberapa kebijakan yang bersifat jangka pendek dan kurang terintegrasi dengan strategi pembangunan berkelanjutan. Program-program bantuan sosial misalnya, cenderung memberikan dampak sementara tanpa memfasilitasi perubahan struktural yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan secara permanen. Sementara itu, kebijakan pemberdayaan ekonomi sering kali tidak didukung oleh

akses yang memadai terhadap modal, pasar, dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, kebijakan pemerintah sering kali tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih erat dan terencana dengan baik antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan, rekomendasi kolaborasi dalam penelitian ini yakni kolaborasi pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, komunitas masyarakat dan media.

Secara keseluruhan, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Kelurahan

Kameloh Baru memerlukan perbaikan dalam hal perencanaan jangka panjang, integrasi program, dan partisipasi aktif dari pihak yang tergabung dalam kolaboratif pengentasan kemiskinan. Pemerintah perlu berfokus pada kebijakan yang memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial, serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai aktor untuk menciptakan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan. Hanya dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, kemiskinan di Kelurahan Kameloh Baru dapat ditangani secara efektif.

* * *





Oleh:

MUSRIPAH, S.Pi

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda Dinas Perikanan Kota Palangka Raya

ABSTRAK

Ikan gabus merupakan salah satu jenis ikan lokal di perairan umum yang bernilai ekonomis tinggi. Ikan ini mulai dari ukuran kecil (anak) sampai ukuran besar dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan ikan gabus berbagai ukuran dari kecil sampai

besar tersebut menyebabkan kebutuhan ikan gabus semakin meningkat, maka intensitas penangkapan ikan ini di alam juga semakin tinggi. Semakin intensifnya penangkapan ikan gabus memberikan dampak terhadap menurunnya populasi ikan gabus di perairan umum.



Dengan semakin tingginya permintaan terhadap ikan gabus, maka eksploitasi ikan gabus di alam semakin meningkat, hal ini dapat megancam kelestarian sumber daya ikan gabus. Untuk mengantisipasi kepunahan ikan gabus, perlu dilakukan usaha pengembangbiakannya.

Untuk perlindungan dan pelestarian dalam menghindari kepunahan dan mengembalikan keberadaan jenis ikan di perairan umum wilayah Kota Palangka Raya perlu adanya upaya pengelolaan sumber daya induk di alam (adanya Demplot) dengan pengembangbiakan indukan gabus di alam untuk memperoleh benih, agar benih yang dihasilkan siap untuk ditebar kembali ke habitat aslinya (Restocking) yang dapat menjaga dan memenuhi stock keberadaan ikan lokal di alam. Selain itu juga, benih yang dihasilkan dapat digunakan sebagai benih budidaya ikan untuk dijadikan ikan konsumsi dan pemasok bahan dasar hasil olahan serba ikan, dalam meningkatkan hasil produksi ikan tangkapan dan meningkatkan taraf hidup nelayan.

Latar Belakang

Wilayah perairan umum Kota Palangka Raya terdiri dari 3 (tiga) aliran

sungai yaitu sungai Rungan, sungai Kahayan dan sungai Sabangau, 103 (seratus tiga) danau dan rawa serta daerah rawa gambut yang tersebar diberbagai wilayah kelurahan dengan potensi sumber daya perikanan yang cukup banyak.

Potensi tersebut dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan perikanan apabila dikelola dengan baik dan benar untuk mempertahankan ekosistem sumber daya perikanan di perairan umum.

Pengembangbiakan ikan lokal perlu dilakukan karena mengingat keberadaan ikan lokal yang hampir punah keberadaannya. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya hasil produksi tangkapan terhadap beberapa jenis ikan lokal teretentu di wilyah perairan umum Kota Palangka Raya. Salah satu jenis ikan yang mulai



berkurang produksinya dan mempunyai nilai konsumsi dan ekonomis yang tinggi dan merupakan ikan lokal yang hidup di wilayah perairan umum Kota Palangka Raya adalah ikan Gabus.

Pemilihan Ikan Gabus sebagai objek pengembangbiakan ini didasarkan pada faktor pelestarian keberadaannya dan kaya akan protein. Ikan gabus merupakan salah satu jenis ikan di perairan umum yang bernilai ekonomis tinggi. Ikan ini mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan ikan Gabus berbagai ukuran dari kecil sampai besar

tersebut menyebabkan kebutuhan ikan Gabus semakin meningkat, maka intensitas penangkapan ikan ini di alam juga semakin tinggi. Semakin intensifnya penangkapan ikan Gabus memberikan dampak terhadap menurunnya populasi ikan Gabus di perairan umum.

Ikan gabus memiliki potensi biologi yang baik untuk dikembangkan menjadi komoditi budidaya perikanan. Secara biologi, ikan gabus tahan terhadap kondisi lingkungan perairan dengan keasaman rendah (asam) seperti di lahan rawa. Dalam kondisi kekurangan air ikan gabus masih

PELAKSANAAN RESTOCKING PERAIRAN UMUM WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA HASIL DARI DEMPLOT SEI KATUNE

No.	Lokasi Restocking	Pelaksanaan	Jenis Ikan	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Danau Burung Kelurahan Petuk Katimpun	25 Juni 2019	Gabus	20.000	Hasil Demplot Sei Katune Kelurahan
2.	Kecamatan Jekan Raya Danau Marang Kelurahan Marang	20 November 2020	Gabus	15.000	Banturung Hasil Demplot Sei Katune Kelurahan
3	Kecamatan Bukit Batu Danau Rigei Kelurahan Tumbang Tahai	24 November 2021	Gabus	20.000	Banturung Hasil Demplot Sei Katune Kelurahan
4.	Kecamatan Bukit Batu Danau Teluk Kelurahan Kameloh Baru	28 Juli 2022	Gabus	12.000	Banturung Hasil Demplot Sei Katune Kelurahan
5.	Kecamatan Sabangau Danau Panjang Kelurahan Tumbang Tahai	21 Juni 2023	Gabus	10.000	Banturung Hasil Demplot Sei Katune Kelurahan
6.	Danau Hanjalutung Kelurahan Petuk Katimpun	22 November 2023	Gabus	10.000	Banturung Hasil Demplot Sei Katune Kelurahan
7.	Kelurahan Danau Tundai Kecamatan Sabangau	23 November 2023	Gabus	14.000	Banturung Hasil Demplot Sei Katune Kelurahan Banturung

PELAKSANAAN PENULARAN BENIH IKAN GABUS KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN TANGKAP

No.	Nama Kelompok	Ketua	Pelaksanaan	Jumlah (ekor)
1.	Simpei Karuhei	Kornelius	5 Desember 2020	750
2.	Simpei Karuhei	Kornelius	31 Agustus 2021	500
3.	Gawi Hantantiring	Sulasmai	31 Agustus 2021	500
4.	Tintu Pambelum	Target	15 Juli 2022	500

mampu bertahan hidup karena ikan gabus memiliki alat bantu pernafasan sehingga dapat memanfaatkan oksigen bebas di udara untuk proses pernapasannya. Sifat ini sangat menguntungkan dalam usaha membudidayakan ikan gabus, karena itu ikan gabus memiliki ketahanan hidup lebih tinggi.

Selain memiliki keunggulan aspek biologi, ikan gabus juga memiliki prospek bisnis yang menjanjikan. Selain sebagai lauk pauk, ikan gabus dapat diolah menjadi berbagai produk olahan seperti pempek, kerupuk dan sebagainya. Saat ini, ikan gabus

juga dijadikan bahan obat penyembuh luka, karena daging ikan gabus mengandung albumin yang dapat berfungsi dalam penyembuhan luka.

Untuk perlindungan dan pelestarian dalam menghindari kepunahan dan mengembalikan keberadaan jenis ikan di perairan umum wilayah Kota Palangka Raya perlu adanya upaya pengelolaan sumber daya indukan di alam (Demplot) dengan pengembangbiakan indukan di alam untuk memperoleh benih, agar benih yang dihasilkan siap untuk ditebar kembali ke



habitat aslinya (Restocking) yang dapat menjaga dan memenuhi stock keberadaan ikan lokal di alam. Selain itu juga, benih yang dihasilkan dapat digunakan sebagai benih budidaya ikan untuk dijadikan ikan konsumsi dan pemasok bahan dasar hasil olahan serba ikan, dalam meningkatkan hasil produksi ikan tangkapan dan meningkatkan taraf hidup nelayan.

Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Pengelolaan Sumber daya Induk Ikan Gabus di Alam Wilayah Perairan Umum Kota Palangka Raya adalah untuk pelestarian sumber daya ikan di alam agar tidak punah sehingga dapat terwujudnya sumber daya perikanan yang lestari dan berkelanjutan.

HASIL KEGIATAN

Sebagai bentuk upaya Dinas Perikanan Kota Palangka Raya khususnya Bidang Perikanan Tangkap, dalam pengembangan, pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya ikan lokal yang lestari dan berkelanjutan di perairan umum Kota Palangka Raya, maka dalam kesempatan ini kami akan melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sumber daya Indukan Ikan Gabus di alam dan kemudian dikembangkan di daratan/kolam dengan perkawinan alami/pemijahan alami dalam menghasilkan benih ikan lokal. Yang mana sumber pakannya dimodifikasi dengan pakan pellet.



LANGKAH – LANGKAH DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA INDUK IKAN GABUS DI ALAM

1. Tempat (persiapan media pemijahan ikan gabus)



(Jenis Kolam) : Kolam Tanah, Kolam terpal dan kolam beton.

Media budidaya ikan gabus dengan bak beton menggunakan luas 3 x 3 x 1 meter. Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan yang meliputi pengeringan dan pembersihan bak beton dengan cara disikat. Langkah selanjutnya kolam diisi air dengan ketinggian 40 cm. Beri tanaman air berupa eceng gondok dan pipa paralon sebagai tempat persembunyian.

2. Seleksi Indukan

- ✓ Seleksi indukan jantan dan betina
- ✓ Pemisahan tempat indukan jantan dan betina



Cara membedakan jantan dan betina dengan melihat tanda-tanda pada tubuh. Jantan ditandai dengan kepala lonjong, warna tubuh lebih gelap, lubang kelamin memerah dan apabila diurut keluar cairan



putih bening. Betina ditandai dengan kepala membulat, warna tubuh lebih terang, perut membesar dan lembek, bila diurut keluar telur. Keberhasilan budidaya ikan gabus juga ditentukan oleh kualitas induk yang digunakan. Usia ikan gabus yang ideal untuk



dijadikan induk antara 11-12 bulan dengan bobot 150-200 gr. Perbedaan kelamin dapat dilihat pada bagian lubang urogenital di bagian perut.



3. Pemijahan

Pemijahan dilakukan dalam bak beton atau fibreglass. Caranya, siapkan sebuah bak beton ukuran panjang 5 m, lebar 3 m dan



tinggi 1 m; keringkan selama 3 – 4 hari; masukan air setinggi 50 cm dan biarkan mengalir selama pemijahan; sebagai perangsang pemijahan, masukan eceng gondok hingga menutupi sebagian permukaan bak; masukan 1 ekor indukan jantan dan 1 ekor indukan betina ke dalam

bak yang sama. Ikan dibiarkan memijah secara alami yang biasanya terjadi pada malam hari. Perilaku memijah ditandai dengan kedua induk akan saling mengejar sampai akhirnya membentuk bola dan terjadi proses pembuahan. Telur yang dibuahi akan berwarna bening dan akan menetas dalam waktu 48 jam. Untuk mengetahui terjadinya pemijahan dilakukan pengontrolan setiap hari. Telur bersifat mengapung di permukaan air. Satu ekor induk betina bisa menghasilkan telur sebanyak 10.000 sampai 11.000 butir.

4. Penetasan

Setelah ikan gabus bertelur, telur diambil menggunakan sekupnet halus dan telur siap ditetaskan. Penetasan telur dapat dilakukan di dalam akuarium/fiberglass. Telur ikan gabus akan menetas sekitar 24 jam dan hingga dua hari larva tidak perlu diberi pakan, karena masih menyimpan makanan cadangan berupa sisa kuning telur.

5. Pemeliharaan Larva

Pakan yang diberikan ke larva selama pemeliharaan berupa pakan alami yakni artemia, daphnia dan cacing sutra.

Pemeliharaan larva dilakukan setelah 2 hari menetas hingga berumur 15 hari, dalam akuarium/fiberglass yang sama dengan kepadatan 5 ekor/liter. Kelebihan larva bisa dipelihara dalam akuarium lain. Pada umur 2 hari, larva diberi pakan berupa naupli artemia dengan frekwensi 3 kali sehari. Dari umur 5 hari, larva diberi pakan tambahan berupa daphnia 3 kali sehari, secukupnya. Untuk menjaga kualitas air, dilakukan penyiponan, dengan membuang kotoran dan sisa pakan dan mengganti

dengan air baru sebanyak 50%. Penyiponan dilakukan 3 hari sekali, tergantung kualitas air.

6. Pendederan

Jika benih ikan gabus sudah berusia 2 minggu dan panjangnya 3 – 4 cm maka bisa ditebar dikolam pada pagi hari; setelah 2 hari, beri 1 – 2 kg tepung pelet atau pelet.

7. Seleksi Benih

Persiapkan tempat (Bak, kolam).

8. Seleksi Calon Indukan

Seleksi benih untuk indukan.

Capaian Yang Dihasilkan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangbiakan indukan di alam, kriteria keberhasilan dapat diukur di antaranya sebagai berikut :

1. Terwujudnya kegiatan Demplot pengelolaan sumber daya induk di alam
2. Terwujudnya peningkatan pengembangan sumber daya ikan lokal (Terlaksananya penularan benih ikan gabus ke KUB nelayan tangkap).
3. Terwujudnya peningkatan perlindungan/pelestarian sumber daya ikan lokal di perairan umum wilayah Kota Palangka Raya (Terlaksananya Restocking Perairan Umum)

Faktor Penghambat Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Induk di Alam

Beberapa hal yang perlu diantisipasi bagi keberhasilan pencapaian tujuan dari kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Induk di Alam agar sesuai dengan target yang telah

ditentukan antara lain :

1. Faktor alam/lingkungan
2. Hama dan Penyakit Ikan

PENUTUP

Ikan gabus memiliki banyak manfaat bagi manusia terutama sebagai bahan pangan/makanan dan dalam bidang farmasi/obat-obatan. Ikan gabus memiliki potensi biologi yang baik untuk dikembangkan menjadi komoditi budidaya perikanan. Ikan gabus merupakan salah satu ikan yang memiliki nilai protein tinggi dan memiliki kadar albumin, dengan harga jual yang cukup tinggi. Pengembangan teknologi pengembangbiakan ikan gabus dengan tujuan konservasi sumber daya perairan dan budidaya perlu terus ditingkatkan, mengingat potensi lahan rawa yang cukup luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiingin. 2013. Budidaya Ikan Gabus. Kalimantan Selatan.
- Muslim., S.Pi.,M.Si. 2017. Budidaya Ikan Rawa. Seri 1 : Ikan Gabus (Channa Striata). Universitas Sriwijaya. Kampus Unsri. Palembang.
- Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, Tahun 2018-2023.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

* * *



Pj. Wali Kota Palangka Raya didampingi Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya melaksanakan restocking bibit ikan di Danau Hanjalutung, Kelurahan Petuk Katimpun (22 November 2023)



oleh:
Widiastuti Sri Asi, S.Si
(Penyuluh Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya)

Pemerintah Kota Palangka Raya yang diwakili oleh Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahyu bersama dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong meresmikan langsung Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah di Jalan Wortel Kelurahan Panarung Kota Palangka Raya. Rabu, Tanggal 23 Mei 2024.

Peresmian Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah dihadiri oleh Direktur Jenderal

Penanganan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian LHK RI, Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Pengurangan Sampah KLHK Vinda Damayanti, Sekda Prov. Kalteng H. Nuryakin, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Pj. Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahyu beserta jajarannya, Pj. Sekda Kota Palangka Raya Achmad Zaini, Wali Kota Palangka Raya Periode 2018-2023 Fairid Naparin serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.



Foto 1. Peresmian Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah



Foto 2. Penandatanganan Prasasti Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah

Pemerintah Kota Palangka Raya yang diwakili oleh Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahyu bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong meresmikan langsung Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah di Jalan Wortel Kelurahan Panarung Kota Palangka Raya.

Peresmian Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah dihadiri oleh Direktur Jenderal Penanganan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian LHK RI,



Foto 3. Tamu Undangan Yang menghadiri Peresmian Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah

Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Pengurangan Sampah KLHK Vinda Damayanti, Sekda Prov. Kalteng H. Nuryakin, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Pj. Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahyu beserta jajarannya, Pj. Sekda Kota Palangka Raya Achmad Zaini, Wali Kota Palangka Raya Periode 2018-2023 Fairid Naparin serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Pengenalan Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dengan memahami pentingnya daur ulang sampah, kita dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian Bumi Tambun Bungai Kota Palangka Raya. untuk generasi yang akan datang.

Kota Palangka Raya merupakan salah satu kota yang terpilih oleh KLHK untuk dibangun Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah sebagai langkah nyata dalam mendukung Program Pemerintah dalam Pengolahan Sampah di Kota Palangka Raya.

Sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan paling serius di Indonesia, yang terjadi hampir di setiap daerah, khususnya wilayah perkotaan. Hampir setiap hari, jutaan ton sampah diproduksi, dan sebagian besar sampah itu berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Persoalan sampah bukan hanya tidak sedap dipandang, yang membuat tempat terlihat kumuh, tetapi bisa berakibat fatal bagi lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara, sehingga upaya penanganan



Foto 4. Meninjau Proses Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah

sampah yang baik menjadi sangat penting, salah satunya dengan mendaur ulang.

Mengenal Lebih Jauh PDU Sampah?

Tujuan diselenggarakannya Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah adalah untuk mendorong masyarakat menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan tertib. Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah juga telah

didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti kerajinan tangan dan pupuk. Merupakan sistem yang memungkinkan sampah dipisahkan dan didistribusikan ke pasar yang bernilai ekonomis, sistem yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dengan menabung sampah.

Tujuan utama didirikannya Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah adalah untuk mendukung pengelolaan sampah di Indonesia. Tujuan Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah selanjutnya adalah menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, tertib dan bersih. Pusat Daur Ulang (PDU) sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti kerajinan tangan dan pupuk yang memiliki

nilai ekonomi. Diharapkan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat meningkatkan pendapatannya dari pembuangan limbah PDU. Selain itu, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat serta terhindar dari berbagai penyakit akibat sampah.

Proses Daur Ulang Sampah

Daur ulang sampah adalah proses mengubah sampah menjadi bahan yang



Foto 5. Proses Pemilahan Sampah Organik dan Anorganik

dapat digunakan kembali. Proses ini melibatkan beberapa langkah, seperti pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pembuatan produk baru dari sampah yang sudah didaur ulang. Berikut adalah langkah-langkah umum proses daur ulang sampah:

1. Pengumpulan: Sampah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik rumah tangga, industri, maupun tempat umum.
2. Pemilahan: Sampah kemudian dipilah-pilah berdasarkan jenisnya, seperti plastik, kertas, logam, dan lain-lain. Hal ini penting untuk memudahkan proses selanjutnya.
3. Pengolahan: Sampah yang sudah dipilah kemudian diolah melalui berbagai

metode, seperti pencucian, penghancuran, atau peleburan, tergantung pada jenis sampahnya.

4. Daur ulang: Setelah diolah, sampah tersebut kemudian dijadikan bahan baku untuk membuat produk baru. Misalnya, plastik bekas dapat dijadikan bahan untuk membuat barang-barang plastik baru.
5. Pemasaran: Produk baru yang terbuat dari sampah daur ulang kemudian dipasarkan dan dijual kembali kepada masyarakat.

Proses daur ulang sampah memiliki manfaat besar dalam mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan baku baru. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif sampah terhadap ekosistem.

Manfaat Daur Ulang Sampah

Daur ulang sampah memiliki berbagai manfaat yang sangat penting, baik bagi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Berikut adalah beberapa manfaat dari proses daur ulang sampah:

1. Pengurangan Limbah: Daur ulang membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau sampah yang dibuang ke lingkungan. Hal ini membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan mengurangi dampak negatif sampah terhadap ekosistem.
2. Konservasi Sumber Daya Alam: Dengan mendaur ulang sampah, kita dapat mengurangi penggunaan bahan baku baru yang diperlukan untuk membuat produk baru. Ini membantu dalam konservasi sumber daya alam, seperti kayu, air, dan energi.



Foto 6. Penanganan Sampah di Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah



Foto 7. Hasil Produk dari Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah

3. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca: Proses produksi barang baru dari bahan baku baru seringkali menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dengan mendaur ulang sampah, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dalam proses produksi.
4. Penciptaan Lapangan Kerja: Industri daur ulang sampah menciptakan lapangan kerja baru dalam proses pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan produksi barang-barang daur ulang. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan perekonomian lokal.
5. Edukasi Lingkungan: Proses daur ulang juga dapat menjadi sarana edukasi lingkungan bagi masyarakat. Dengan memahami pentingnya daur ulang

sampah, masyarakat dapat lebih peduli terhadap lingkungan dan melakukan praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

6. Pengurangan Biaya Pembuangan Sampah: Dengan mendaur ulang sampah, biaya pembuangan sampah ke TPA dapat dikurangi. Hal ini dapat menghemat biaya bagi pemerintah maupun perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah.

Dengan memahami manfaat dari proses daur ulang sampah, diharapkan kita dapat lebih memotivasi diri untuk melakukan praktik daur ulang dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan Kota Palangka Raya minim Sampah.

Produk Daur Ulang Sampah

Proses daur ulang sampah menghasilkan berbagai produk yang bermanfaat dan dapat digunakan kembali. Beberapa contoh produk daur ulang sampah yang umum dihasilkan meliputi:

- a. Sampah organik dapat dibuat kompos atau pupuk.
- b. Sampah Anorganik dapat dibuat hasil karya yang mempunyai nilai jual

Produk-produk daur ulang sampah ini memiliki manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari yaitu bernilai ekonomis, mengurangi penggunaan bahan baku baru, mengurangi limbah, dan mendukung praktik ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan produk daur ulang, kita dapat membantu menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif sampah terhadap ekosistem.

Kerjasama dengan Masyarakat

Kerjasama dengan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama. Salah satu tujuan dari Pusat daur ulang sampah adalah menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Dengan mengelola sampah secara efisien, kita dapat

menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan.

Saling mendukung dan bekerja sama, segala hambatan dapat diatasi dengan lebih mudah. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program akan menciptakan rasa memiliki yang kuat. Dengan membangun hubungan yang baik, kerjasama dengan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Melalui kerjasama yang erat dengan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sejahtera untuk semua.

Dengan memanfaatkan pusat daur ulang sampah, tentunya juga akan dapat menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar Kota Palangka Raya. Menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama mendukung gerakan daur ulang untuk menjaga bumi kita. Bersama-sama, kita dapat meraih impian dan tujuan bersama demi kemajuan yang berkelanjutan.

* * *



POTENSI DANAU KOTA PALANGKA RAYA



Danau Hanjalutung

Oleh:

Ir. INDRIARTI RITADEWI M.AB
Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya

I. GAMBARAN UMUM

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan

sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam satu sistem bisnis perikanan. Perikanan juga bisa dikatakan sebagai usaha pengambilan atau pemanfaatan sumberdaya hayati perairan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.



Danau Tahai

Sebagai sumberdaya hayati perikanan termasuk dalam kategori sumberdaya dapat pulih atau *a renewable resource*.

Kota Palangka Raya merupakan Ibukota dari Provinsi Kalimantan Tengah, secara geografis terletak pada 113°30' - 14°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
 Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau
 Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
 Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

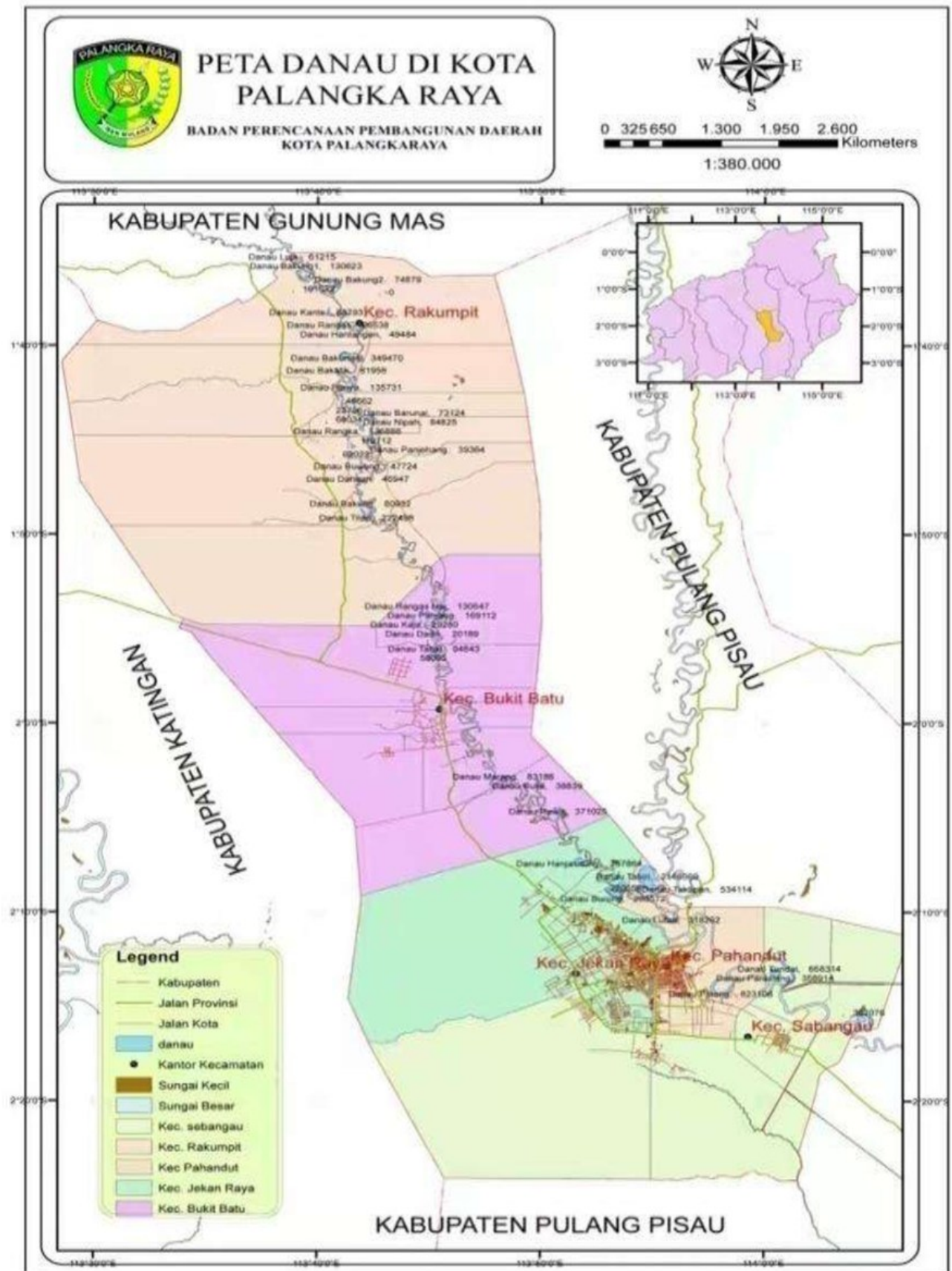
Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan

Pahandut dengan luas wilayah 117,25 Km², Kecamatan Sabangau 583,50 Km², Kecamatan Jekan Raya, 352,62 Km², Kecamatan Bukit Batu 572,00 Km² dan Kecamatan Rakumpit dengan luas 1.053,14 Km².

Kota Palangka Raya mempunyai luas perairan umum 515,8 Km² yang terdiri dari Sungai luasnya 100,09 Km², Danau luasnya 13,63 Km² dan Rawa 400,03 Km². Kota Palangka Raya dialiri oleh 3 (tiga) muara sungai yaitu Sungai Kahayan, Sungai Rungan dan Sungai Sabangau serta 103 (seratus tiga) Danau yang tersebar di berbagai wilayah kelurahan dengan potensi sumber daya perikanan yang cukup banyak.

Di Kecamatan Bukit Batu terdapat 45 buah danau, Kecamatan Rakumpit 42 buah

II. PETA DANAU





Danau Teluk

danau, Kecamatan Sabangau 10 buah danau, Kecamatan Pahandut 4 buah danau dan Kecamatan Jekan Raya 3 buah danau. Masing-masing danau ini memiliki keunikan dan karakteristik sendiri. Namun secara umum, danau-danau yang ada di Kota Palangka Raya merupakan **danau oxbow**, di mana secara hidrologis sumber airnya atau suplai airnya berasal dari limpasan sungai utama (Sungai Kahayan dan Sungai Rungan).

Danau adalah badan air alami berukuran besar yang dikelilingi oleh daratan dan tidak berhubungan dengan laut, kecuali melalui sungai. Danau bisa berupa cekungan yang terjadi karena peristiwa alam yang kemudian menampung dan menyimpan air yang berasal dari hujan, mata air, rembesan, dan air sungai (Kementrian Lingkungan

Hidup, 2004). Danau merupakan sumber daya air tawar yang berada di daratan yang berpotensi sangat besar serta dapat dikembangkan dan didayagunakan bagi pemenuhan berbagai kepentingan (Irianto, 2011).

Danau merupakan perairan umum yang sering dimanfaatkan untuk usaha perikanan oleh masyarakat Kalimantan Tengah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mata pencaharian dengan penangkapan dan budidaya ikan, serta pelestarian stok ikan.

Sebagaimana kita ketahui, wilayah Kalimantan Tengah pada umumnya ditutupi oleh lahan gambut. Berada di lahan gambut bercampur dengan dekomposisi (pembusukan) dari lingkungan sekitar danau



Danau Marang

seperti akar tumbuhan, batang pohon, daun-daun, hewan, menjadikan mineral memicu air danau tersebut berwarna merah. Bahkan di musim tertentu bisa menjadi kecoklatan. Inilah yang menjadi salah satu keunikan Danau yang ada di Palangka Raya.

Dalam rangka menjaga agar kelestarian Sumberdaya Perikanan di Perairan Umum (Sungai, Danau, Rawa dan Perairan Gambut) maka peran Dinas Perikanan Kota Palangka Raya adalah sangat penting dalam menjaga, melindungi dan mengawasi keberadaan Pengelolaan dan Peningkatan hasil produksi Sumberdaya Ikan di wilayah Perairan Umum Kota Palangka Raya sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kota Palangka Raya.

III. POTENSI SUMBER HAYATI PERIKANAN

A. Danau – Danau yang Ada di Wilayah Kota Palangka Raya, antara lain :

1. Kecamatan Jekan Raya (Danau Hanjalutung)

Salah satu danau di Kalimantan Tengah yang sering digunakan dalam usaha perikanan oleh masyarakat sekitar adalah Danau Hanjalutung yang merupakan danau oxbow yaitu danau yang terbentuk akibat aliran sungai yang terputus (sungai mati). Danau Oxbow pada umumnya berukuran kecil namun memiliki produktivitas ikan yang tinggi. Danau Hanjalutung merupakan danau yang masih berhubungan dengan Sungai Rungan (anak Sungai Kahayan). Secara geografis perairan Danau Hanjalutung

terletak di wilayah administratif Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Selain Danau Hanjalutung, di sekitar daerah Petuk Katimpun terdapat beberapa danau yang sangat potensial yang sering dijadikan tempat penangkapan ikan oleh para penduduk sekitar, seperti Danau Burung, Danau Bunter, Danau Hambuwut, Danau Rangas dan Danau Buntut Tunggul. Danau Hanjalutung memiliki luas berkisar antara 10 ha sampai 30 ha, dengan panjang sekitar 2 km, kedalaman 8 m dan lebarnya berkisar antara 100 m sampai 150 m, yang secara geografis terletak antara 02°07'31.9"LS dan 113°51'56.2" BT (Okviaharty, 2004).

Danau yang masih terhubung dengan Sungai Rungan tersebut, dihuni berbagai jenis ikan air tawar seperti jelawat, baung, tahuman, saluang dan berbagai jenis ikan air tawar lainnya. Secara kondisi alam danau ini juga dinilai eksotis, estetikanya ada, sehingga sasarannya bukan hanya untuk pelestarian ekologi tetapi juga kita mendorong nilai jualnya untuk objek pariwisata.

2. Kecamatan Bukit Batu (Danau Tahai)

Danau Tahai berada di Desa Tahai, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya. Berjarak sekitar 30 Km pusat kota. Jika berkendara hanya memerlukan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Lokasi Danau Tahai cukup mudah diakses, hanya sekitar 3 Km dari jalan raya dengan akses jalan sudah beraspal.

Tahai sendiri dalam bahasa Dayak berarti Danau. Bila diartikan menjadi unik yaitu 'Danau yang bernama Danau'. Hal ini mungkin karena ukuran danau relatif kecil.

Danau Tahai terbentuk dari hasil perubahan arah aliran air Sungai Kahayan.

3. Kecamatan Pahandut (Danau Takapan)

Kecamatan Pahandut mempunyai 4 buah danau yaitu Danau Rangas (15 ha), Danau Tabiri (15 ha), Danau Takapan (30 ha) dan Danau Lutan (7 ha). Danau tersebut terletak di Kelurahan Tumbang Rungan yang merupakan perairan potensial untuk mengembangkan sumber daya ikan air tawar. Secara geografi, danau tersebut di aliri air dengan arus yang tidak deras yang berasal dari sungai Kahayan.

Kondisi geografis seperti itu memungkinkan berbagai plankton dapat hidup dan berlimpah di danau tersebut sebagai sumber makanan ikan – ikan kecil. Dengan berlimpahnya makanan yang terdapat di dalam danau, maka ikan – ikan kecil akan tumbuh dan berkembang secara optimal.

4. Kecamatan Sabangau (Danau Teluk)

Pemerintah Kota Palangka Raya, terus mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada. Terutama sumber daya perairan, yakni sungai dan danau.

Demikian hal tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, saat dibincangi terkait pemanfaatan Danau Teluk di Kelurahan Kameloh Baru, Kecamatan Sabangau sebagai kawasan wisata.

Disampaikan Fairid, dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam Danau Teluk di Kelurahan Kameloh Baru itu, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dan meminta kepada dinas terkait untuk

IV.POTENSI PERAIRAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

No	Nama Perairan Umum	Jenis Perairan Umum	Luas (Ha)	Lokasi		Aktifitas Penangkapan Ikan (Ya/Tidak)
				Kelurahan	Kecamatan	
1	Bakung 1	Danau	± 5 ha	Mungku Baru	Rakumpit	Ya
2	Luja	Danau	± 6 ha	Mungku Baru	Rakumpit	Ya
3	Panjang	Danau	± 4 ha	Mungku Baru	Rakumpit	Ya
4	Rangkahan	Danau	± 4 ha	Mungku Baru	Rakumpit	Ya
5	Puhing	Danau	± 2,5 ha	Mungku Baru	Rakumpit	Ya
6	Kante	Danau	± 0 ha	Mungku Baru	Rakumpit	Ya
7	Bakung 2	Danau	± 5 ha	Mungku Baru	Rakumpit	Ya
8	Bakung 3	Danau	± 6 ha	Mungku Baru	Rakumpit	Ya
9	Durah	Danau	± 4 ha	Mungku Baru	Rakumpit	Ya
10	Rangas	Danau	± 8 ha	Mungku Baru	Rakumpit	Ya
11	Hentangan	Danau	± 2,5 ha	Mungku Baru	Rakumpit	Ya
12	Pelabangan	Danau	± 2 ha	Bukit Sua	Rakumpit	Ya
13	Bakung 4	Danau	± 9 ha	Bukit Sua	Rakumpit	Ya
14	Bakatik	Danau	± 3 ha	Bukit Sua	Rakumpit	Ya
15	Bajuku	Danau	± 3,5 ha	Bukit Sua	Rakumpit	Ya
16	Panya	Danau	± 9 ha	Bukit Sua	Rakumpit	Ya
17	Ranggau	Danau	± 3 ha	Bukit Sua	Rakumpit	Ya
18	Tabakang	Danau	± 2 ha	Bukit Sua	Rakumpit	Ya
19	Ranggau	Danau	± 2,5 ha	Petuk Barunai	Rakumpit	Ya
20	Tabakang	Danau	± 2,6 ha	Petuk Barunai	Rakumpit	Ya
21	Barunai	Danau	± 5 ha	Petuk Barunai	Rakumpit	Ya
22	Manuah	Danau	± 4 ha	Petuk Barunai	Rakumpit	Ya
23	Nipar	Danau	± 5 ha	Petuk Barunai	Rakumpit	Ya
24	Rangka	Danau	± 5,5 ha	Petuk Barunai	Rakumpit	Ya
25	Sangumang	Danau	± 5 ha	Petuk Barunai	Rakumpit	Ya
26	Karamahan	Danau	± 3 ha	Panjehang	Rakumpit	Ya
27	Panjehang	Danau	± 6 ha	Panjehang	Rakumpit	Ya
28	Bakung	Danau	± 5,5 ha	Gaung Baru	Rakumpit	Ya
29	Dahirang	Danau	± 6 ha	Gaung Baru	Rakumpit	Ya
30	Viku	Danau	± 3 ha	Gaung Baru	Rakumpit	Ya
31	Burung	Danau	± 3 ha	Gaung Baru	Rakumpit	Ya
32	Bakung	Danau	± 3 ha	Pager	Rakumpit	Ya
33	Aring Pahi	Danau	± 6,5 ha	Pager	Rakumpit	Ya
34	Illung	Danau	± 3 ha	Pager	Rakumpit	Ya

IV.POTENSI PERAIRAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA (Lanjutan)

No	Nama Perairan Umum	Jenis Perairan Umum	Luas (Ha)	Lokasi		Aktifitas Penangkapan Ikan (Ya/Tidak)
				Kelurahan	Kecamatan	
35	Tilap	Danau	± 3,5 ha	Pager	Rakumpit	Ya
36	Menteng	Danau	± 2,5 ha	Pager	Rakumpit	Ya
37	Teluk Hongkoi	Danau	± 1,5 ha	Petuk Bukit	Rakumpit	Ya
38	Marang	Danau	± 8 ha	Petuk Bukit	Rakumpit	Ya
39	Lewu	Danau	± 8 ha	Petuk Bukit	Rakumpit	Ya
40	Bentuk Petuk	Danau	± 7 ha	Petuk Bukit	Rakumpit	Ya
41	Burung	Danau	± 3 ha	Petuk Bukit	Rakumpit	Ya
42	Betung	Danau	± 2,5 ha	Kanarakan	Bukit Batu	Ya
43	Sahang	Danau	± 6 ha	Kanarakan	Bukit Batu	Ya
44	Kajang	Danau	± 4 ha	Kanarakan	Bukit Batu	Ya
45	Kanarakan	Danau	± 6 ha	Kanarakan	Bukit Batu	Ya
46	Kaipei	Danau	± 8 ha	Kanarakan	Bukit Batu	Ya
47	Kak	Danau	± 1 ha	Kanarakan	Bukit Batu	Ya
48	Rangas Kurik	Danau	± 5 ha	Kanarakan	Bukit Batu	Ya
49	Rangas Hai	Danau	± 8 ha	Kanarakan	Bukit Batu	Ya
50	Panjang	Danau	± 1 ha	Kanarakan	Bukit Batu	Ya
51	Rasau Hai	Danau	± 1 ha	Kanarakan	Bukit Batu	Ya
52	Binti	Danau	± 3 ha	Kanarakan	Bukit Batu	Ya
53	Bunter	Danau	± 3 ha	Kanarakan	Bukit Batu	Ya
54	Dadik	Danau	± 3,5 ha	Kanarakan	Bukit Batu	Ya
55	Yakub	Danau	± 2 ha	Sei Gohong	Bukit Batu	Ya
56	Pehon	Danau	± 4 ha	Sei Gohong	Bukit Batu	Ya
57	Gelombang	Danau	± 3,5 ha	Sei Gohong	Bukit Batu	Ya
58	Bangamat	Danau	± 2 ha	Sei Gohong	Bukit Batu	Ya
59	Kaja	Danau	± 2 ha	Sei Gohong	Bukit Batu	Ya
60	Seha	Danau	± 3,5 ha	Sei Gohong	Bukit Batu	Ya
61	Lewu	Danau	± 20 ha	Tangkiling	Bukit Batu	Ya
62	Bakung	Danau	± 2,5 ha	Banturung	Bukit Batu	Ya
63	Panganen	Danau	± 2,5 ha	Banturung	Bukit Batu	Ya
64	Rigei	Danau	± 4 ha	Banturung	Bukit Batu	Ya
65	Bahu Tintu	Danau	± 2,5 ha	Tumbang Tahai	Bukit Batu	Ya
66	Tuntung Dua	Danau	± 3 ha	Tumbang Tahai	Bukit Batu	Ya
67	Tatas Djumadi	Danau	± 2,5 ha	Tumbang Tahai	Bukit Batu	Ya
68	Tatumbu	Danau	± 3,5 ha	Tumbang Tahai	Bukit Batu	Ya

IV.POTENSI PERAIRAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA (Lanjutan)

No	Nama Perairan Umum	Jenis Perairan Umum	Luas (Ha)	Lokasi		Aktifitas Penangkapan Ikan (Ya/Tidak)
				Kelurahan	Kecamatan	
69	Bunter	Danau	± 2 ha	Tumbang Tahai	Bukit Batu	Ya
70	Tatas Negara	Danau	± 1,5 ha	Tumbang Tahai	Bukit Batu	Ya
71	Tahai	Danau	± 20 ha	Tumbang Tahai	Bukit Batu	Ya
72	Sangumang	Danau	± 3 ha	Tumbang Tahai	Bukit Batu	Ya
73	Buyut	Danau	± 3 ha	Tumbang Tahai	Bukit Batu	Ya
74	Paruk	Danau	± 4,5 ha	Tumbang Tahai	Bukit Batu	Ya
75	Pantar	Danau	± 7 ha	Tumbang Tahai	Bukit Batu	Ya
76	Kalawa	Danau	± 7 ha	Tumbang Tahai	Bukit Batu	Ya
77	Marang	Danau	± 25 ha	Marang	Bukit Batu	Ya
78	Rasau	Danau	± 1,5 ha	Marang	Bukit Batu	Ya
79	Panjang	Danau	± 6 ha	Marang	Bukit Batu	Ya
80	Cangkir	Danau	± 6 ha	Marang	Bukit Batu	Ya
81	Dapur	Danau	± 15 ha	Marang	Bukit Batu	Ya
82	Madang	Danau	± 6 ha	Marang	Bukit Batu	Ya
83	Bunter	Danau	± 1,5 ha	Marang	Bukit Batu	Ya
84	Biawak	Danau	± 16 ha	Marang	Bukit Batu	Ya
85	Pahewan	Danau	± 17 ha	Marang	Bukit Batu	Ya
86	Bukit	Danau	± 1,5 ha	Marang	Bukit Batu	Ya
87	Hampapak	Danau	± 17 ha	Marang	Bukit Batu	Ya
88	Hanjolutung	Danau	± 15 ha	Petuk Katimpun	Jekan Raya	Ya
89	Rawet	Danau	± 17 ha	Petuk Katimpun	Jekan Raya	Ya
90	Bunter	Danau	± 3 ha	Petuk Katimpun	Jekan Raya	Ya
91	Rangas	Danau	± 15 ha	Tumbang Rungan	Pahandut	Ya
92	Tabiri	Danau	± 15 ha	Tumbang Rungan	Pahandut	Ya
93	Takapan	Danau	± 30 ha	Tumbang Rungan	Pahandut	Ya
94	Lutan	Danau	± 7 ha	Tumbang Rungan	Pahandut	Ya
95	Tundai	Danau	± 10 ha	Danau Tundai	Sabangau	Ya
96	Patih Rumbih	Danau	± 2 ha	Danau Tundai	Sabangau	Ya
97	Pakaluk	Danau	± 1 ha	Danau Tundai	Sabangau	Ya
98	Parasiang	Danau	± 3 ha	Danau Tundai	Sabangau	Ya
99	Parasiang	Danau	± 5 ha	Bereng Bengkel	Sabangau	Ya
100	Teluk	Danau	± 3 ha	Kameloh Baru	Sabangau	Ya
101	Teluk Petak	Danau	± 10 ha	Kameloh Baru	Sabangau	Ya
102	Parasiang	Danau	± 3 ha	Kameloh Baru	Sabangau	Ya
103	Burung	Danau	± 2 ha	Kameloh Baru	Sabangau	Ya

POTENSI SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM JENIS IKAN LOKAL
DI PERAIRAN UMUM WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

Sepat



Baung



Tapah



Lais



Gurame



Anjungan



Seluang



Patung



Riu



Kerandang



Kihung



Gabus/Haruan



Jelawat



Betok/Papuyu



Balida/Pipih



terlebih dahulu melakukan kajian terhadap kawasan perairan Danau Teluk, juga mengarahkan untuk menyelesaikan administrasi terkait aset di kawasan tersebut. Adapun manfaat danau bagi masyarakat di antaranya mampu menunjang kehidupan hingga mempertahankan nilai-nilai budaya, agar keberadaannya terus berlanjut, maka diperlukan upaya pelestarian manfaat danau bagi masyarakat yang dilakukan secara optimal. Terutama melalui sinergitas bersama untuk membuat danau tetap terjaga, dan memberikan manfaatnya bagi manusia.

Seperti diketahui sebelumnya, Dinas Perikanan menggelar kegiatan restocking atau pelepasliaran ikan di Danau Teluk sebanyak 65.000 ekor benih ikan telah dilepasliarkan.

Adapun benih ikan yang telah dilepasliarkan yakni 5.000 ekor benih ikan Gabus, 50.000 ekor benih ikan Betok. Pelepasliaran benih ikan itu hasil kerjasama dari BPBAT Mandiangin, serta 10.000 benih ikan Gabus dari hasil Demplot Sei Katune.

5. Kecamatan Rakumpit (Danau Sangumang)

Kecamatan Rakumpit mempunyai danau sebanyak 42 (empat puluh dua) buah danau yang tersebar di berbagai Kelurahan, seperti Kelurahan Pager, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Bukit Sua dan Kelurahan Mungku Baru.

Adapun danau potensial yang untuk dikembangkan yaitu Danau Sangumang (5 ha) yang berada di Kelurahan Petuk Barunai.

B. Faktor-Faktor Penghambat Sumber Daya Perikanan Tangkap Kota Palangka Raya

1. Illegal Fishing

Luasnya potensi kawasan perairan umum yang dimiliki Kota Palangka Raya ditambah lagi sifat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan bersifat umum dan terbuka bagi masyarakat luas, memberikan potensi kecenderungan terjadi kasus ilegal fishing.

Kegiatan illegal fishing yang terjadi di sungai dan danau yaitu masih adanya penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti penyetrum listrik dan bahan beracun seperti tuba yang mengakibatkan jumlah bibit ikan berkurang karena mati, ikan-ikan mati, air menjadi keruh dan tidak dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ekosistem sungai terganggu.

2. Penambang Emas Ilegal

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah sedang mengalami kerusakan yang cukup parah. Salah satu kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan DAS Kahayan adalah kegiatan pertambangan yang terjadi di daerah hulu DAS Kahayan yaitu Sungai Rungan. Kerusakan DAS Kahayan tersebut perlu di kendalikan untuk memelihara fungsi hidrologi dan ekologi DAS. Fungsi hidrologi dan ekologi DAS dipandang sebagai kesejahteraan semua pihak yang saling bergantung atas jasa yang diberikan dalam suatu DAS. Kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam terutama di wilayah daerah aliran sungai akan

mengakibatkan penurunan mutu dan daya dukung sumber daya setempat dan kerugian di wilayah hilirnya.

Oleh karena itu pengelolaan DAS di Kota Palangka Raya harus segera ditangani karena akan menyebabkan daerah aliran sungai menjadi kritis.

Banyaknya penambang emas tanpa izin atau PETI di Kota Palangka Raya, mengakibatkan dampak lingkungan yang cukup serius, sehingga kegiatan pertambangan ini perlu adanya pengaturan dan penegasan untuk mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, karena keberadaan para penambang emas liar sangat merusak lingkungan terutama penambangan di sungai yang menjadi alat transportasi masyarakat setempat. Semakin banyak pertambangan emas, maka akan menghasilkan buangan yang berupa lumpur dan endapan akibat penyedotan dari dasar sungai. Hal ini akan berpengaruh terhadap kadar air di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Endapan atau buangan limbah tersebut dapat menimbulkan tingkat kekeruhan air sungai serta pencemaran logam. Semakin banyak dan semakin besarnya penambangan emas yang dilakukan oleh penduduk sekitar terutama penambangan yang tidak memiliki izin, maka akan memperbesar kemungkinan pencemaran air terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan. Pencemaran air merupakan suatu peristiwa masuknya zat, unsur, energi, atau komponen lain kedalam air akan menyebabkan kualitas air berkurang atau terganggu. Padahal dalam kehidupan sehari-hari air sangatlah penting bagi

manusia. Kualitas air yang terganggu dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan makhluk hidup sekitarnya. Kualitas air yang tercemar ditandai dengan berubahnya rasa, bau, dan warna. Akibat dari pencemaran air, sejumlah ikan yang setiap harinya di konsumsi oleh masyarakat telah terkontaminasi endapan atau buangan limbah dari pertambangan emas tersebut. Dengan demikian, apabila pencemaran tidak diatasi dengan benar, maka akan merugikan para penduduk yang berada di Kota Palangka Raya.

V. PENUTUP

Kota Palangka Raya mempunyai 103 (seratus tiga) Danau yang tersebar di berbagai wilayah kelurahan dengan potensi sumber daya perikanan yang cukup banyak.

Di Kecamatan Bukit Batu terdapat 45 buah danau, Kecamatan Rakumpit 42 buah danau, Kecamatan Sabangau 10 buah danau, Kecamatan Pahandut 4 buah danau, dan Kecamatan Jekan Raya 3 buah danau.

Masing-masing danau ini memiliki keunikan dan karakteristik sendiri. Namun secara umum, danau-danau yang ada di Kota Palangka Raya merupakan **danau oxbow**, di mana secara hidrologis sumber airnya atau suplai airnya berasal dari limpasan sungai utama (Sungai Kahayan dan Sungai Rungan).

* * *





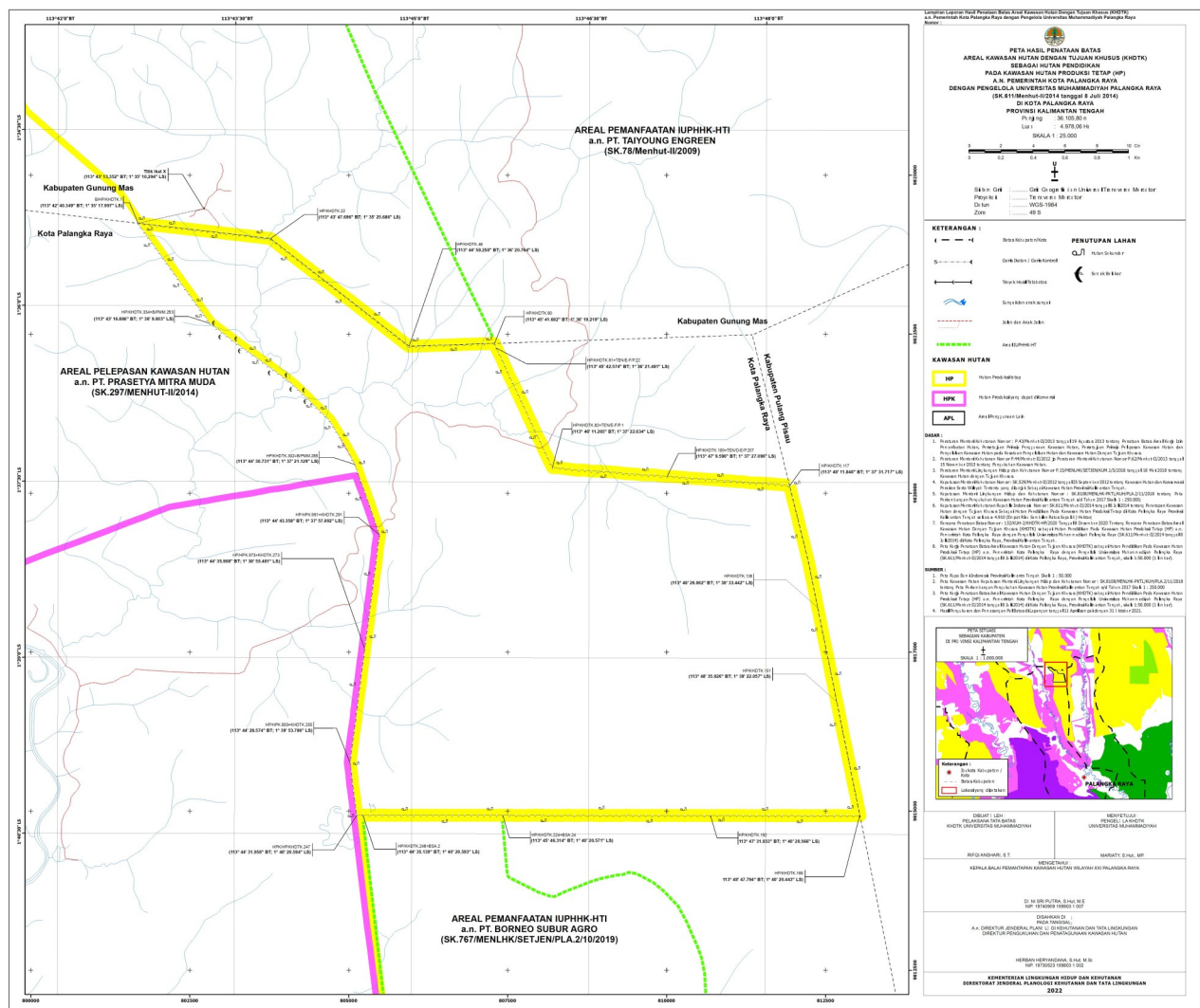
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) MUNGKU BARU HADIR SEBAGAI LABORATORIUM ALAM

Oleh:
YUSEPTA, S.E.

Analisis Program Pembangunan pada Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Sesuai dengan amanat UU No. 41 tahun 1999, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk tujuan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta kepentingan agama dan budaya setempat, yang di manfaatkan tanpa mengubah fungsi kawasan tersebut.

Kota Palangka Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 611/Menhut-II/2014, tanggal 8 Juli 2014, Tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagai Hutan Pendidikan Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah seluas \pm 4.910 (Empat Ribu Sembilan Ratus Sepuluh) Hektar,



Peta Hasil Penataan Batas Areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Sebagai Hutan Pendidikan

yang menyerahkan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) kepada Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Hutan Pendidikan yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Kawasan KHDTK Mungku Baru dengan luasan ± 4.910 Ha, memiliki tipe kawasan seperti gambut, kerangas, *riparian forest* dan *lowland forest* dengan tingkat keanekaragaman hayati baik itu vegetasi maupun satwa yang cukup tinggi. Sebagai "Laboratorium Alam" Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mungku Baru memiliki beberapa manfaat penting sebagai sarana penelitian, di antaranya:

1. **Penelitian Ekosistem:** KHDTK menyediakan lingkungan alami yang terlindungi, ideal untuk penelitian ekosistem hutan, keanekaragaman hayati, dan interaksi antar spesies. Ini memungkinkan para peneliti untuk mempelajari dinamika alam tanpa gangguan manusia yang berlebihan.
2. **Konservasi Keanekaragaman Hayati:** Sebagai kawasan hutan yang dilindungi, KHDTK berfungsi sebagai tempat konservasi bagi berbagai jenis flora dan fauna, beberapa di antaranya mungkin langka atau terancam punah. Ini juga membantu dalam penelitian mengenai konservasi spesies tersebut.



Kunjungan bersama ke KHDTK antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

3. **Pengembangan Metode Pengelolaan Hutan:** KHDTK memberikan ruang bagi pengembangan dan pengujian metode pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Penelitian di sini dapat mencakup manajemen hutan, restorasi ekosistem, serta teknik-teknik pemulihan hutan yang rusak.
4. **Pendidikan dan Pelatihan:** KHDTK juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi kehutanan. Mereka dapat belajar langsung dari lingkungan hutan yang terjaga dan mempraktekkan teori-teori yang dipelajari di kelas.
5. **Monitoring Perubahan Iklim:** Dengan adanya perlindungan khusus, KHDTK dapat digunakan sebagai tempat untuk memonitor perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem hutan. Data yang dihasilkan dapat membantu dalam memahami serta memitigasi efek perubahan iklim.
6. **Pengembangan Produk Hutan Non-Kayu:** KHDTK juga bisa dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan produk

hutan non-kayu, seperti obat-obatan, getah, dan bahan lainnya yang memiliki nilai ekonomi namun tidak merusak lingkungan hutan.

Manfaat-manfaat ini menjadikan KHDTK sebagai sumber daya yang sangat berharga untuk penelitian ilmiah dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam Konteks lain KHDTK dapat memberikan pendapatan valuasi ekonomi karbon, Valuasi ekonomi adalah nilai barang dan jasa dapat diperjualbelikan, sehingga memberikan pendapatan. Dari konsep ekonomi kegunaan, kepuasan atau kesenangan yang diperoleh individu atau masyarakat tidak terbatas terhadap barang dan jasa yang diperoleh melalui jual beli (transaksi), semua barang dan jasa yang diperjualbelikan menyangkut sifat barang dan jasa tersebut, yaitu memiliki kegunaan bersifat langka dan kepemilikan yang jelas (Lidiawati, 2003). Perhitungan nilai ekonomi



Pengamatan kegiatan masyarakat di KHDTK Mungku Baru

karbon sangat penting untuk saat ini, selain untuk mengetahui nilai ekonomi karbon juga memudahkan dalam pembayaran karbon



Kegiatan Penambang Ilegal pada aliran air



Pengamatan udara pada aliran air di Kawasan KHDTK

dalam perdagangan karbon. Potensi kandungan karbon pada tegakan hutan di Kawasan KHDTK Mungku Baru perlu dilakukan perhitungan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya selaku pengelola kawasan hutan yang bekerja sama dengan Universitas Muhamadiyah Palangka Raya untuk mengetahui kandungan karbon yang tersimpan pada KHDTK Mungku Baru agar didapatkan perhitungan jumlah karbon (ton/ha) yang kemudian diekstrapolasi dengan luasan areal yang berhutan di Kawasan KHDTK Mungku Baru.

Berdasarkan pengamatan udara yang dilakukan (Tim Bappedalitbang Kota Palangka Raya bersama Dinas Lingkungan

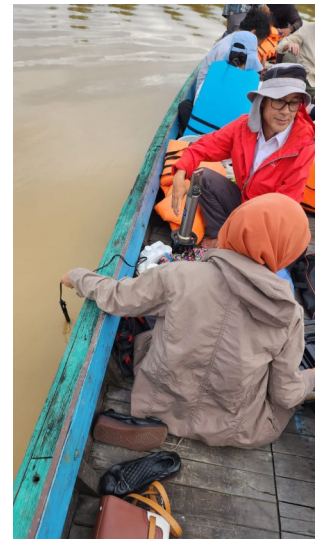
Hidup Kota Palangka Raya) pada Kawasan KHDTK Mungku Baru terdapat pembukaan area penebangan pohon yang masuk pada Kawasan KHDTK, serta membentuk jalur perlintasan / jalan keluarnya kayu log. Hal tersebut dapat merusak fungsi Kawasan KHDTK Mungku Baru. Selain itu ditemukan pula beberapa penambang ilegal di sekitar Kawasan KHDTK yang beroperasi, hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya fungsi sungai sebagai area penampungan air serta area resapan.

* * *



Aktifitas pada Kawasan Hutan

“Menyelamatkan alam dimulai dari satu langkah kecil dari dalam diri.”



Kunjungan Lapangan Ekspedisi Danau Hanjalutung, Danau Tahay dan Danau Teluk

Mengembangkan Perikanan Berkelanjutan dan Ekowisata dengan
Partisipasi Masyarakat Lokal
Studi Dinamika Ekologi Sungai dan Danau Oxbow di Kawasan Gambut,
Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Oleh:

Luki Subehi (luki001@brin.go.id), Yustiawati—Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN,
Rloysart Alfons—Bappedalitbang Kota Palangka Raya

PENDAHULUAN

Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRLSDA - BRIN) melakukan survei di Danau Hanjalutung, Danau Tahay dan Danau Teluk, Palangka Raya pada tanggal 27 s.d. 31 Agustus 2024 dalam rangka kegiatan *Japan - ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP)-Net 2024* sebagai sponsor utama dengan judul *"Developing Sustainable Fishery and Ecotourism with Local People Participation Based on Ecological Dynamics*

Study of River and Oxbow Lake in Peatland Area, Palangka Raya, Central Kalimantan".

Tim survei terdiri atas dua orang peneliti yaitu Dr. Luki Subehi dan Dr. Yustiawati. Kegiatan ini juga didukung oleh *Japan Society for the Promotion of Sciences (JSPS)* dan Asosiasi Alumni JSPS Indonesia (JAAI).

Program JASTIP di Danau Hanjalutung merupakan bagian dari Riset Kolaboratif JASTIP-Net 2024 dengan tema: Aksi Terpadu Restorasi Gambut dan Mangrove serta Pembangunan Berkelanjutan



Gambar 1. Kunjungan lapangan dipimpin Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB, bersama Tim Jepang, Tim BRIN dan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya

melalui Konsep *Bio-Village*, dimana koordinator dari pihak Indonesia adalah Prof. Wahyu Dwianto dari Pusat Riset Biomaterial - BRIN dan Prof. Yasuyuki Kono dari *Center for Southeast Asian Studies* (CSEAS), Kyoto University untuk pihak Jepang. Program penelitian potensi danau oxbow di lahan gambut Palangka Raya 2024 ini merupakan tahun ketiga dari tiga tahun yang diajukan. Konsep yang diusulkan dalam penelitian ini adalah menggali kembali potensi danau oxbow sebagai kawasan ekowisata dan sebagai laboratorium studi danau oxbow di Indonesia yang sebelumnya telah diinisiasi oleh Pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun 2015. Selain itu, tim program JSPS yang dikoordinir oleh Prof. Yoshimura Chihiro (Tokyo Institute of Technology) juga turut mendukung program ini.

Kalimantan karena ada 113 danau oxbow yang terletak di sekitar sungai. Danau Hanjalutung adalah salah satunya. Terletak di Desa Petuk Ketimpun, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sekitar 30 menit dari pusat Kota Palangka Raya. Akses yang mudah dan dekat dengan pusat kota dibandingkan dengan danau oxbow lainnya, membuat danau ini sangat strategis untuk diusulkan sebagai pusat studi danau oxbow nasional. Danau Hanjalutung dengan luas 15 ha tetap tergenang pada musim kemarau, sehingga menjadikan danau ini sebagai danau oxbow permanen di Kota Palangka Raya. Sumber air di Danau Hanjalutung berasal dari sungai utama dan lahan gambut karena danau ini terhubung dengan Sungai Rungan (anak Sungai Kahayan) dan kawasan lahan gambut yang mengelilingi danau.

DANAU OXBOW HANJALUTUNG

Palangka Raya terkenal dengan jumlah danau oxbow terbanyak di

RUMAH TERAPUNG (RUMAH LANTING)

Rumah Lanting, nama lokal untuk rumah terapung ini dibangun oleh



Gambar 2. Tim periset BRIN sedang melaksanakan pengukuran di Danau "Oxbow" Hanjalutung



Gambar 3. Survei dan Pengambilan sampel di Danau Oxbow Palangka Raya, Kalteng

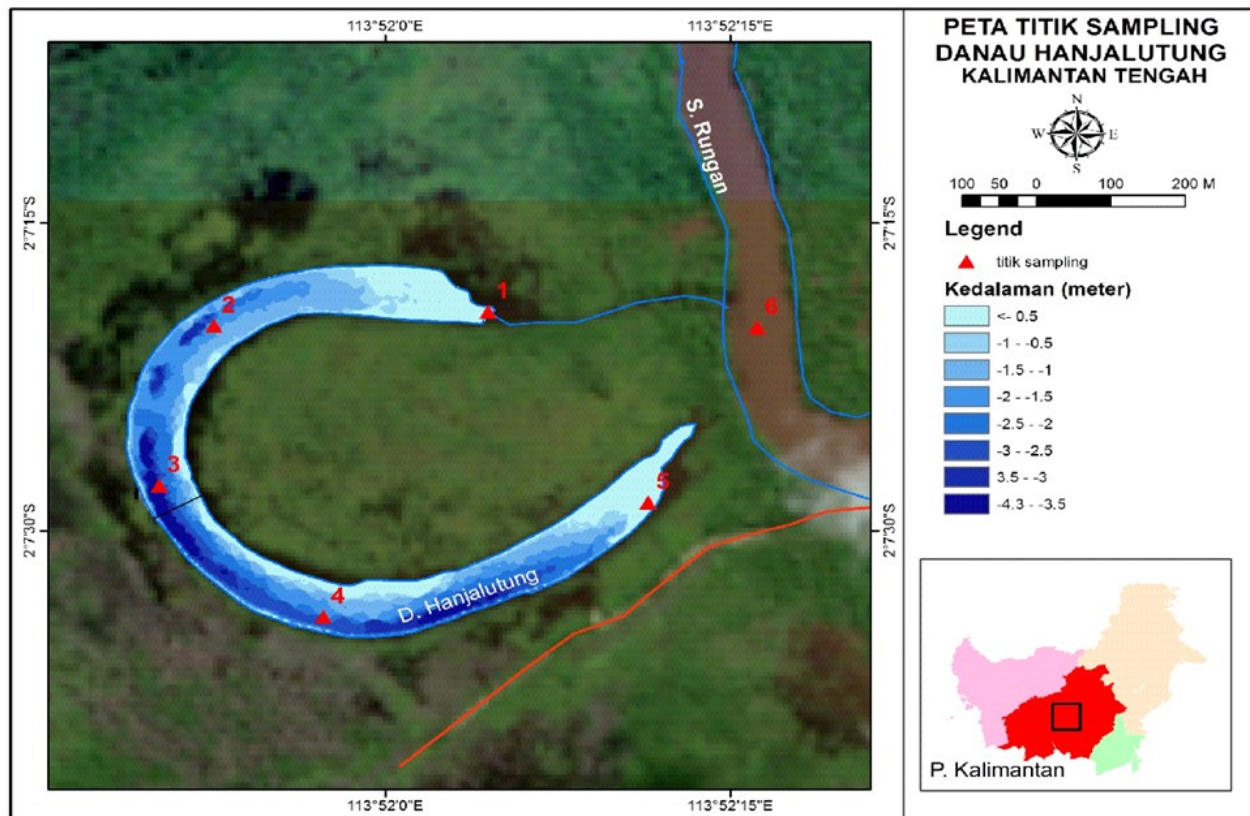
Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memfasilitasi kegiatan sosialisasi masyarakat setempat dan sebagai pusat kegiatan masyarakat terkait pengelolaan Danau Hanjalutung. Di dekat rumah apung, terdapat sebuah bangunan yang seharusnya digunakan sebagai laboratorium. Namun, pemanfaatan bangunan tersebut belum terealisasi.

1. Kegiatan Pengambilan Sampel dan Pengamatan di Danau Hanjalutung

Untuk mengetahui kondisi Danau Hanjalutung saat ini, dilakukan pengambilan sampel dan pengukuran kualitas air dan biota (fitoplankton dan makroinvertebrata benthik). Informasi mengenai kondisi biota saat ini juga penting mengingat Petuk Ketimpun pernah mengalami banjir beberapa minggu sebelumnya dan permukaan air Danau Hanjalutung meningkat selama periode tersebut.



Gambar 4. Kegiatan pengambilan sampel air



Gambar 5. Titik-titik pengambilan sampel air Danau Hanjalutung

Pengambilan sampel dilakukan di lima titik di area danau dan satu titik di area sungai utama. Beberapa parameter kualitas air yang diukur secara *in-situ* antara lain suhu air, pH, Oksigen Terlarut (DO), Konduktivitas, Oksidasi Reduksi Potensial (ORP), dan Salinitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat Water Quality Checker - Horriba dan CTD Ringko profiler, Secci disk, GPS. Sementara itu, parameter lain seperti Total Nitrat (TN), Total Phospat (TP), Total Padatan Tersuspensi (TSS), Klorofil-a, DOC, dan biota (Fitoplankton dan Makroinvertebrata Bentos) akan dianalisa di laboratorium di Bogor. Fitoplankton diambil dengan menggunakan *hand-plankton net*, sedangkan makroinvertebrata bentik diambil sampelnya dengan menggunakan Ekman grab sampler.

Secara fisik, warna air danau berwarna coklat tua seperti teh hingga

hitam. Berdasarkan pengukuran terakhir, air danau memiliki kisaran pH yang rendah, yaitu sekitar 4,31 hingga 4,38. Selama ini, air mengalir dari sungai dan menyambung ke area danau. Namun, rendahnya tingkat pH ini disebabkan oleh banyaknya bahan organik yang berasal dari gambut seperti asam humat yang turut menurunkan pH perairan. Di sisi lain, beberapa permasalahan di Palangka Raya, terkait pengelolaan danau oxbow adalah banyaknya penambangan liar (emas) di sekitar sungai dan danau. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas air danau dan juga sedimentasi dan pendangkalan.

2. Kegiatan Pengambilan Sampel dan Pengamatan di Danau Tahay dan Danau Teluk

Danau Tahay dan Danau Teluk merupakan danau Oxbow yang direkomendasikan bersama Danau



Gambar 6. Infrastruktur dan fasilitas di Danau Tahay dan Danau Teluk sebagai Pusat Ekowisata dan Perikanan

Hanjalutung oleh Pemerintah Daerah sebagai proyek percontohan pusat ekowisata dan perikanan. Program ini dicanangkan dalam rangka mewujudkan Palangka Raya sebagai Kota Danau di Indonesia. Gambar 6 menunjukkan infrastruktur dan fasilitas di Danau Tahay dan Danau Teluk sebagai pusat ekowisata dan perikanan.

3. Diskusi dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat Setempat

Selama survei di Palangka Raya, tidak hanya dilakukan pengukuran dan pengambilan sampel air di Danau Hanjalutung, Danau Tahay, dan Danau Teluk, melainkan juga diskusi dengan beberapa instansi pemerintah daerah terkait termasuk



Gambar 7. Diskusi dipimpin Wali Kota Palangka Raya di Aula Peteng Karuhei I Kompleks Kantor Wali Kota Palangka Raya, dihadiri unsur Pemerintah Kota Palangka Raya, BRIN, Tim Jepang dan Universitas Palangka Raya

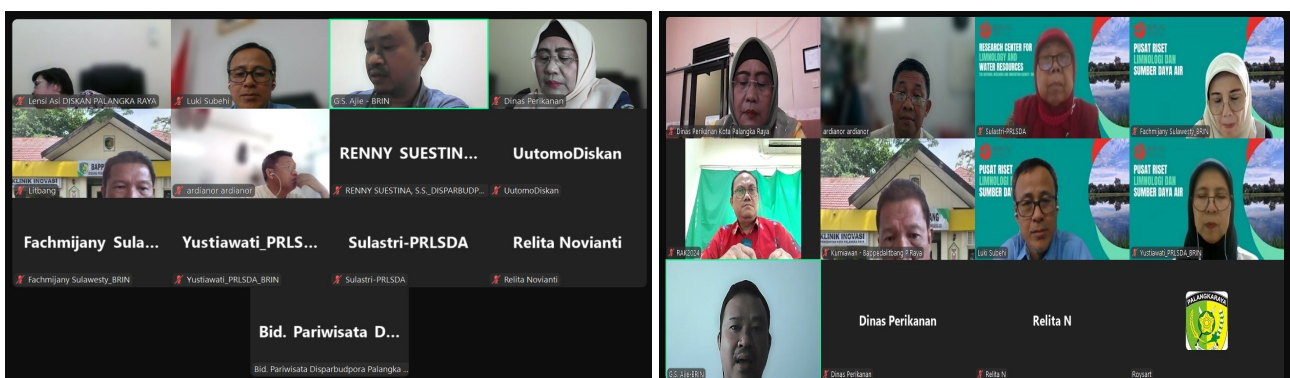
Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dan Universitas Palangka Raya. Forum diskusi kelompok dilaksanakan di Kantor Wali Kota Palangka Raya.

Dalam diskusi tersebut, Pj. Wali Kota Palangka Raya, Dr. Hera Nugrahayu berharap BRIN dan tim Jepang (didukung

oleh JASTIP dan JSPS) dapat membantu dan mendukung mereka dalam mewujudkan tujuan/target untuk menjadi kota danau di Indonesia. Untuk itu didiskusikan semua potensi kolaborasi di masa depan untuk melaksanakan program ini.

PERSIAPAN PRA KUNJUNGAN LAPANGAN

Sebelum Tim dari BRIN dan Jepang mengunjungi Kota Palangka Raya dalam



Gambar 8. Koordinasi antar instansi via zoom meeting



Gambar 9. Publikasi kegiatan ekspedisi dana oxbow di beberapa media

rangka survei danau oxbow, yaitu Danau Hanjalutung, Danau Tahay dan Danau Teluk, telah dilaksanakan koordinasi-koordinasi secara online termasuk beberapa rapat daring via zoom meeting. Pihak-pihak yang aktif dalam koordinasi-koordinasi ini yaitu Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya, Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, Bidang Litbang Bappedalitbang Kota Palangka Raya, Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya. Poin-poin yang dihasilkan dalam koordinasi-koordinasi ini menjadi panduan dalam rangka efisiensi pelaksanaan kunjungan lapangan ke Palangka Raya, khususnya bagi Tim dari BRIN dan Jepang.

PENUTUP

Dari survei ini dapat disimpulkan bahwa danau-danau oxbow Danau Hanjalutung, Danau Tahay, dan Danau Teluk merupakan ekosistem perairan pedalaman yang sangat potensial untuk mengembangkan ekowisata dan produktivitas perikanan nasional sebagai Kota Danau. Syarat utama dari program ini adalah adanya rencana induk dan partisipasi dari para pemangku kepentingan (pemerintah daerah dan masyarakat). Rencana induk merupakan bagian penting untuk mendapatkan dukungan (finansial dan perhatian) dari pemerintah daerah dan nasional. Selanjutnya, untuk menyusun rencana induk Danau Hanjalutung, perlu diperkuat oleh institusi lain, termasuk akademisi dan ilmuwan.


MEDIA CENTER
 KOTA PALANGKA RAYA




MEDIA CENTER
 KOTA PALANGKA RAYA

[PROFIL](#)
[BERITA](#)
[BERITA FOTO](#)
[AGENDA](#)
[ARTIKEL](#)
[GALERI](#)
[DOWNLOAD](#)
[KONTAK](#)
[PALANGKARAYA.GO.ID](#)

BREAKING NEWS
 DLH Kota Palangka Raya Akan Libatkan Masyarakat di Setiap Kelurahan untuk Program PLTB

PENCARIAN

LOGO HUT KOTA PALANGKA RAYA



PALANGKA RAYA KOKOH
 Kolaboratif, Koordinatif dan Harmonis
 17 Juni 1965 - 17 Juni 2024 / 17 Juli 1957 - 17 Juli 2024

Hari jadi Pemerintah Kota Palangka Raya ke-59 dan hari jadi Kota Palangka Raya ke-67 tahun 2024

Tema :
 Palangka Raya Kokoh (Kolaboratif, Koordinatif dan Harmonis)



Pj Wali Kota : Pengelolaan Danau Oxbow Prioritas dalam Pembangunan Berkelanjutan

29 Agustus 2024
 Berita
 42 Views

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahyayu menyebutkan bahwa Pemko berkomitmen untuk menjadikan pengelolaan Danau Oxbow sebagai salah satu prioritas dalam program pembangunan berkelanjutan Kota Palangka Raya.

Hal ini disapaikannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Danau Oxbow yang berlangsung di Ruang Rapat Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota Palangka Raya, Rabu (28/8/2024).


Hera Nugrahyayu menjelaskan bahwa Danau Oxbow, sebagai salah satu ekosistem penting di Palangka Raya, memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung ekonomi lokal.

Gambar 9. Publikasi kegiatan ekspedisi dana oxbow di beberapa media

borneonews.co.id
[News](#)
[Pemerintah](#)
[DPRD](#)

Palangka Raya, Penelitian Ekosistem Tiga Danau Bersama BRIN dan Jepang

Sabtu, 31 Agustus 2024, 22:57 WIB



Pemkot Palangka Raya, Kaleng, melibatkan BRIN dan Jepang untuk meneliti ekosistem tiga danau. ANTABA/HD-Dokumentasi pribadi

2 Shares
 [Share](#)
[Tweet](#)
[Share](#)
[Share](#)

Borneonews - Palangka Raya Pemerintah Kota Palangka Raya, yang terletak di Kalimantan Tengah, telah menjalin kerja sama dengan tim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan peneliti asal Jepang untuk melakukan penelitian mengenai kondisi ekosistem di tiga danau di wilayahnya.

Ketiga danau yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Danau Hanjalutun, Danau Tahai, dan

Development of Oxbow Lake As a Center for fisheries and Tourism in Palangka Raya

Inland Water Environments Studies and Its Water Quality Monitoring

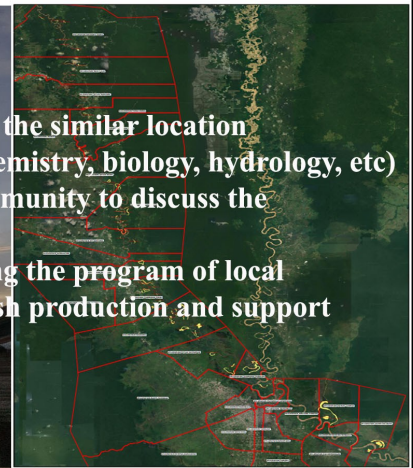
Developing Sustainable Fishery and Eco-tourism with Local People's Participation

Based on Ecological Dynamics Study of River and Oxbow Lake in Peatland Area,
Palangka Raya, Central Kalimantan

August 27 - 31, 2024

Planned Activities:

- Identification and analyzing field data previously and check it in the similar location
- Survey and field measurement (limnological aspects: physics, chemistry, biology, hydrology, etc)
- Organize meeting and discussion with local government and community to discuss the opportunity to develop the area and community enhancement
- Focusing and recommendations on a potential area for supporting the program of local government as eco-tourism and possibilities build a central for fish production and support Palangka Raya as a City of Lake
- Hold discussion with stakeholders in Palangka Raya



Danau Tahai



Danau Hanjalutung



Danau Teluk

Supported by:

- Japan - ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP)
- Japan Society for the Promotion of Sciences (JSPS)
- JSPS Alumni Association of Indonesia (JAII)
- Research Center for Limnology and Water Resources - BRIN



Gambar 10. Poster Ekspedisi Danau Hanjalutung



Oleh:

YUSEPTA, S.E

Analisis Program Pembangunan pada Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Gambaran Umum Danau di Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya merupakan Ibukota dari Provinsi Kalimantan Tengah, secara geografis terletak pada $113^{\circ}30'$ - $14^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35'$ - $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah $2.678,51 \text{ Km}^2$ (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

2. Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

4. Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut dengan luas wilayah $117,25 \text{ Km}^2$, Kecamatan Sabangau $583,50 \text{ Km}^2$, Kecamatan Jekan Raya, $352,62 \text{ Km}^2$, Kecamatan Bukit Batu $572,00 \text{ Km}^2$ dan Kecamatan Rakumpit dengan luas $1.053,14 \text{ Km}^2$.

Kota Palangka Raya berdasarkan pembagian wilayah kelurahan terdapat mempunyai 123 danau dengan luasan secara keseluruhan $932,07 \text{ Ha}$, namun terdapat 22

danau yang masuk ke dalam 2 wilayah kelurahan sehingga jumlah danau di Kota Palangka Raya ada 112 danau, yang dialiri oleh 3 muara sungai yaitu Sungai Kahayan, Sungai Rungan dan Sungai Sabangau. Danau-danau tersebut, yang tersebar di berbagai wilayah kelurahan dengan potensi sumber daya yang beraneka ragam serta dapat dimanfaatkan sebagai kawasan

Tabel 1.

Penyebaran Danau Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Status Bernama		Jumlah
	Bernama	Tak bernama	
PAHANDUT	5	-	5
JEKAN RAYA	4	-	4
SABANGAU	6	1	7
BUKIT BATU	37	14	51
RAKUMPIT	30	26	56
TOTAL	82	41	123

konservasi dan perlindungan hayati. Beberapa kawasan danau yang ada di Kota Palangka Raya merupakan lahan gambut dan merupakan limpasan air sungai, yang pada musim kemarau mengalami kekeringan.

Tiap-tiap danau ini memiliki keunikan dan karakteristik sendiri. Namun secara umum, danau-danau yang ada di Kota Palangka Raya merupakan danau oxbow, di mana secara hidrologis sumber airnya atau suplai airnya berasal dari limpasan sungai utama (Sungai Kahayan dan Sungai Rungan).

Danau merupakan sumber daya perairan umum yang sering dimanfaatkan untuk usaha perikanan oleh masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mata pencaharian dengan penangkapan dan budidaya ikan, serta

pelestarian stok ikan. Ada beberapa danau yang menjadi kawasan wisata, serta merupakan kawasan hutan dan berpotensi sebagai penggunaan air permukaan atau sebagai tempat penyimpanan air (reservoir). Wilayah Kota Palangka Raya pada umumnya ditutupi oleh lahan gambut dengan zona lindung yang terdapat pada kawasan hutan dengan luas paling sedikit 50.192,26 hektar (berdasarkan RTRW) yang merupakan kawasan kubah gambut berkanal dan kawasan kubah gambut tidak berkanal. Berada di lahan gambut bercampur dengan dekomposisi (pembusukan) dari lingkungan sekitar danau seperti akar tumbuhan, batang pohon, daun-daun, hewan, menjadikan mineral memicu air danau tersebut berwarna merah. Bahkan di musim tertentu bisa menjadi kecoklatan. Inilah yang menjadi salah satu keunikan Danau yang ada di Kota Palangka Raya.

Dalam rangka menjaga agar kelestarian potensi di Perairan Umum seperti Danau maka peran Pemerintah Kota Palangka Raya sangat penting dalam menjaga, melindungi dan mengawasi keberadaan Pengelolaan dan Peningkatan terhadap danau di Kota Palangka Raya.

Gambaran Danau Besar di Kota Palangka Raya

Dari beberapa danau yang terletak di beberapa kecamatan di Kota Palangka Raya memiliki berbagai macam karakteristik dan bentuk serta ciri perairan serta ekosistem di dalamnya, adapun beberapa danau dilakukan analisis literasi di antaranya:

1. Kecamatan Jekan Raya (Danau Hanjalutung)

Salah satu danau di Kota Palangka Raya yang sering digunakan dalam usaha perikanan oleh masyarakat sekitar adalah Danau Hanjalutung yang merupakan danau oxbow yaitu danau yang terbentuk akibat aliran sungai yang terputus (sungai mati). Danau Oxbow pada umumnya berukuran kecil namun memiliki produktivitas ikan yang tinggi. Danau Hanjalutung merupakan danau yang masih berhubungan dengan Sungai Rungan (anak Sungai Kahayan). Secara geografis perairan Danau Hanjalutung terletak di wilayah administratif Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Selain Danau Hanjalutung, di sekitar daerah Petuk Katimpun terdapat beberapa danau yang sangat potensial yang sering dijadikan tempat penangkapan ikan oleh para penduduk sekitar, seperti Danau Burung, Danau Bunter, Danau Hambuwut, Danau Rangas dan Danau Buntut Tunggul. Danau Hanjalutung memiliki luas berkisar antara 13,36 ha, dengan panjang sekitar ± 2 km, kedalaman 8 m dan lebarnya berkisar antara 100 m sampai 150 m, yang secara geografis terletak antara 02°07'31.9"LS dan 113°51'56.2" BT (Okviaharty, 2004).

Danau yang masih terhubung dengan Sungai Rungan tersebut, dihuni berbagai jenis ikan air tawar seperti jelawat, baung, tahuman, saluang dan berbagai jenis ikan air tawar lainnya. Secara kondisi alam danau ini juga dinilai eksotis, estetika, sehingga sasarannya bukan hanya untuk pelestarian ekologi tetapi dapat pula di kembangkan sebagai objek wisata.

2. Kecamatan Bukit Batu (Danau Tahai)

Danau Tahai berada di Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya. Berjarak sekitar 30 Km pusat kota. Jika berkendara hanya memerlukan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Lokasi Danau Tahai cukup mudah diakses, hanya sekitar 3 Km dari jalan raya dengan akses jalan sudah beraspal.

Tahai sendiri dalam bahasa Dayak berarti Danau. Bila diartikan menjadi unik yaitu 'Danau yang bernama Danau'. Hal ini mungkin karena ukuran danau relatif kecil. Danau Tahai terbentuk dari hasil perubahan arah aliran air Sungai Rungan.

Keunikan dari Danau Tahai yang ada di Kota Palangka Raya, selain panorama alam sekitar yang memukau, danau ini juga memiliki warna air yang berbeda pada danau pada umumnya, yaitu air dananya yang berwarna merah di tambah banyaknya rumah terapung atau di sebut juga dengan (lanting), membuat suasana di sekitar danau ini terasa sangat asri dan damai saat anda berada di area danau ini.

Dari segi karakteristik Sumberdaya Air dan Penggunaan Lahan memiliki potensi aliran air permukaan 10,45 juta m³ /tahun, serta terdapat potensi air tanah yang lebih besar karena berasosiasi dengan jenis tanah berupa pasir kuarsa. Serta dalam dokumen RTRW Kota Palangka Raya Danau Tahai merupakan Kawasan Peruntukan Perikanan tangkap dan kawasan wisata. (dapat dtambahkan literasi baru)

3. Kecamatan Sabangau (Danau Teluk)

Danau Teluk dengan luasan $\pm 16,37$ Ha dan terhubung dengan Sungai Kahayan berada di Kecamatan Sabangau Kelurahan

Kameloh Baru, dengan karakteristik Sumberdaya Air dan Penggunaan Lahan berupa potensi air tanah dangkal serta penyimpanan air tanah dari hutan rawa gambut. Hampir 98% wilayah danau teluk merupakan area tertutup vegetasi, berupa hutan gambut. Berdasarkan Dokumen RTRW Kota Palangka Raya Danau Teluk merupakan kawasan peruntukan perikanan tangkap yang memiliki potensi habitat dan keragaman jenis ikan, dan merupakan kawasan rawa pada sekitar kawasan danau. Namun sumber dari air danau tersebut banyak di pengaruhi dari kualitas air sungai kahayan.

4. Kecamatan Rakumpit (Danau Sangumang)

Kecamatan Rakumpit memiliki 30 danau yang telah memiliki nama dan ada 26 danau yang belum memiliki nama yang tersebar di berbagai Kelurahan, seperti Kelurahan Pager, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Bukit Sua dan Kelurahan Mungku Baru. Adapun danau potensial yang untuk dikembangkan yaitu Danau Sangumang dengan luasan 0,17Ha yang berada di Kelurahan Petuk Barunai. Danau Sangumang merupakan danau oxbow bentukan dari sungai rungan.

Potensi Pengembangan Danau

Dari gambaran tentang danau yang ada di Kota Palangka Raya maka dapat di lihat potensi-potensi Danau yang dapat di kembangkan tanpa merubah bentang alam dari danau tersebut. Adapun beberapa potensi yang dapat dikembangkan untuk manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan sebagai berikut :

1. Pariwisata Alam

- Wisata Danau dan Sungai: Danau-danau

di Palangka Raya, seperti Danau Tahai, memiliki pemandangan yang indah dan alami yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pengembangan fasilitas seperti area berkemah, perahu wisata, dan jalur hiking di sekitar danau bisa meningkatkan daya tarik pariwisata.

- Ekowisata: Potensi untuk mengembangkan ekowisata sangat besar, dengan menawarkan wisata edukasi tentang ekosistem hutan tropis, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati di sekitar danau.

2. Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

- Habitat Spesies Langka: Danau-danau di Palangka Raya sering kali menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, termasuk spesies endemik dan langka. Kawasan ini bisa dijadikan tempat konservasi untuk melindungi ekosistem air tawar dan hutan sekitarnya.
- Pengelolaan Lahan Gambut: Beberapa danau berada di lahan gambut, yang penting untuk mitigasi perubahan iklim. Pengelolaan yang baik dapat mencegah kebakaran lahan gambut dan mendukung konservasi karbon.

3. Sumber Daya Air

- Pengendalian Banjir: Danau dapat berfungsi sebagai reservoir alami yang membantu mengendalikan banjir, terutama selama musim hujan. Ini penting bagi kota yang memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi.
- Irigasi dan Pertanian: Air dari danau bisa dimanfaatkan untuk irigasi lahan pertanian di sekitarnya, mendukung produksi pangan lokal dan pertanian berkelanjutan.

4. Perikanan dan Sumber Daya Pangan

- **Budidaya Perikanan:** Danau-danau di Palangka Raya memiliki potensi untuk pengembangan budidaya ikan air tawar, yang dapat memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat setempat dan memenuhi kebutuhan pangan lokal.
- **Pengembangan Produk Pangan Lokal:** Ikan dan hasil perikanan dari danau bisa diolah menjadi produk pangan lokal yang memiliki nilai tambah, seperti ikan asin, kerupuk ikan, atau produk olahan lainnya.

5. Pendidikan dan Penelitian

- **Pusat Pendidikan Lingkungan:** Danau-danau ini bisa menjadi pusat pendidikan lingkungan bagi pelajar dan mahasiswa, yang ingin mempelajari ekosistem air tawar, hidrologi, dan konservasi.
- **Penelitian Ilmiah:** Danau-danau di Palangka Raya juga memiliki potensi sebagai lokasi penelitian ilmiah, terutama dalam bidang ekologi, konservasi, dan perubahan iklim.

7. Budaya dan Kearifan Lokal

- **Warisan Budaya:** Danau-danau ini juga bisa menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Dayak, dengan cerita rakyat, tradisi, dan adat istiadat yang terkait dengan air dan lingkungan. Kegiatan budaya seperti festival atau ritual tradisional dapat menarik wisatawan sekaligus melestarikan kearifan lokal.

8. Pengembangan Berkelanjutan

- **Pariwisata Berkelanjutan:** Mengintegrasikan pengembangan pariwisata dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- **Infrastruktur Hijau:** Pembangunan

infrastruktur yang ramah lingkungan di sekitar danau, seperti jembatan kayu, jalan setapak, dan fasilitas yang meminimalkan dampak lingkungan.

Untuk memanfaatkan potensi ini, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta dengan fokus pada pengelolaan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

Faktor Penyebab Kerusakan Danau

Beberapa hal yang perlu diperhatikan penyebab terhadap kerusakan danau. Faktor penyebab kerusakan yang dapat menghambat ekosistem danau di Kota Palangka Raya bisa sangat bervariasi, namun beberapa penyebab utama meliputi :

1. Illegal Fishing

Luasnya potensi kawasan perairan umum yang dimiliki Kota Palangka Raya ditambah lagi sifat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan bersifat umum dan terbuka bagi masyarakat luas, memberikan potensi kecenderungan terjadi kasus ilegal fishing.

Kegiatan illegal fishing yang terjadi disungai dan danau yaitu masih adanya penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti penyetrum listrik dan bahan beracun seperti tuba yang mengakibatkan jumlah bibit ikan berkurang karena mati, ikan-ikan mati, air menjadi keruh dan tidak dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ekosistem sungai terganggu.

2. Penambang Ilegal

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah sedang mengalami kerusakan yang cukup parah. Salah satu kegiatan yang berpotensi

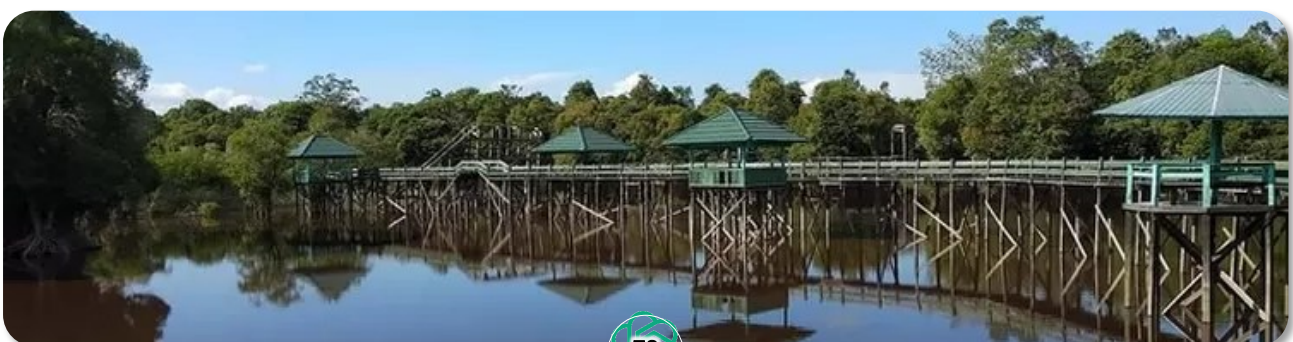
menimbulkan kerusakan lingkungan DAS Kahayan adalah kegiatan pertambangan yang terjadi di daerah hulu DAS Kahayan yaitu Sungai Rungan. Kerusakan DAS Kahayan tersebut perlu di kendalikan untuk memelihara fungsi hidrologi dan ekologi DAS. Fungsi hidrologi dan ekologi DAS dipandang sebagai kesejahteraan semua pihak yang saling bergantung atas jasa yang diberikan dalam suatu DAS. Kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam terutama di wilayah daerah aliran sungai akan mengakibatkan penurunan mutu dan daya dukung sumber daya setempat dan kerugian di wilayah hilirnya.

Oleh karena itu pengelolaan DAS di Kota Palangka Raya harus segera ditangani karena akan menyebabkan daerah aliran sungai menjadi kritis.

Banyaknya penambang emas tanpa izin atau Peti di Kota Palangka Raya, mengakibatkan dampak lingkungan yang cukup serius, sehingga kegiatan pertambangan ini perlu adanya pengaturan dan penegakan untuk mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, karena keberadaan para penambang emas liar sangat merusak lingkungan terutama penambangan di sungai yang menjadi alat transportasi masyarakat setempat. Semakin banyak pertambangan emas, maka akan menghasilkan buangan yang berupa lumpur dan endapan akibat penyedotan dari dasar

sungai. Hal ini akan berpengaruh terhadap kadar air di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Endapan atau buangan limbah tersebut dapat menimbulkan tingkat kekeruhan air sungai serta pencemaran logam. Semakin banyak dan semakin besarnya penambangan emas yang dilakukan oleh penduduk sekitar terutama penambangan yang tidak memiliki izin, maka akan memperbesar kemungkinan pencemaran air terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan. Pencemaran air merupakan suatu peristiwa masuknya zat, unsur, energi, atau komponen lain kedalam air akan menyebabkan kualitas air berkurang atau terganggu. Padahal dalam kehidupan sehari-hari air sangatlah penting bagi manusia. Kualitas air yang terganggu dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan makhluk hidup sekitarnya. Kualitas air yang tercemar ditandai dengan berubahnya rasa, bau, dan warna. Akibat dari pencemaran air, sejumlah ikan yang setiap harinya di konsumsi oleh masyarakat telah terkontaminasi endapan atau buangan limbah dari pertambangan emas tersebut. Dengan demikian, apabila pencemaran tidak diatasi dengan benar, maka akan merugikan para penduduk yang berada di Kota Palangka Raya.

* * *





KAJIAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

Oleh:

Oleh: MARLINA, S.E.

Pengadministrasi Umum Bappedalitbang Kota Palangka Raya

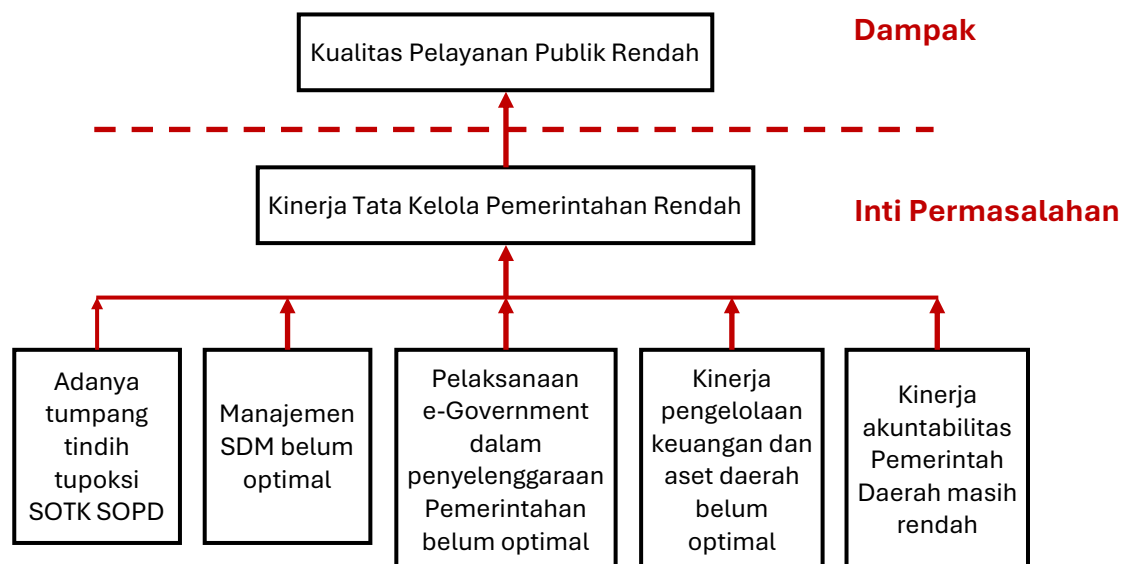
Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya pada Tahun 2024 melaksanakan kerjasama dengan Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kerjasama ini berupa pelaksanaan Kajian partisipasi publik dalam penerapan e-government untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di kota Palangka Raya. Latar belakang, maksud dan tujuan serta hasil yang dicapai disampaikan berikut ini.

Latar Belakang

Arah Kebijakan Tahunan Pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yakni: pemantapan pelayanan publik,

tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya Palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera. Dari arah kebijakan pada tahun ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya menaruh perhatian besar pada sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Perbaikan pada dua sektor ini merupakan langkah yang perlu ditempuh untuk mewujudkan Palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera.

Berdasarkan analisis permasalahan yang termaktub dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, dapat dilihat bahwa rendahnya kinerja tata kelola pemerintahan merupakan inti permasalahan yang berdampak pada kurang optimalnya kualitas pelayanan publik. Dua hal ini saling terkait. Oleh karenanya, pemantapan pada sisi pelayanan publik hanya mungkin terjadi jika terjadi perbaikan besar-besaran pada level tata kelola pemerintahan.



Gambar 1. Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kota Palangka Raya
Sumber : RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

Dalam hal tata kelola, Pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun 2021 berhasil meraih predikat B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) atas implementasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan (Hendri, 2022). Predikat B ini merupakan peningkatan, sebab pada tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Palangka Raya meraih predikat CC. Ada sisi lain, berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kemen PAN-RB pada tahun 2021, Pemerintah Kota Palangka Raya meraih indeks 2,11 dengan Predikat Cukup. Raihan ini juga merupakan perbaikan yang penting untuk diperhatikan, karena pada tahun 2019 dalam evaluasi yang sama, Pemerintah Kota Palangka Raya mendapatkan indeks SPBE sebesar 1,75 dengan Predikat Kurang.

Secara lebih spesifik, jika diamati dalam Dokumen Arsitektur & Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Palangka Raya Tahun 2021 terutama pada bagian Gap Analysis

Kelembagaan, dapat dipahami bahwa ada beberapa kendala kelembagaan dalam pelaksanaan SPBE di level Pemerintah Kota Palangka Raya. Pertama, sebagian besar komponen Tim Koordinasi SPBE belum dibentuk. Kedua, sebagian besar kebijakan terkait SPBE belum ditetapkan. Selanjutnya, dalam hal Pedoman Pengoperasian Layanan SPBE, semua prosedur belum disusun.

Capaian SPBE Pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun 2021 mengkonfirmasi isu strategis bidang tata kelola pemerintahan dalam RPJMD 2018-2023 utamanya dalam hal pelaksanaan e-government. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa belum ada sistem yang dapat digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat Kota Palangka Raya. Website dan media center yang ada sejauh ini hanya menyediakan informasi kegiatan pemerintah daerah dan dokumen formal lainnya, namun tidak ada domain yang dapat digunakan masyarakat Kota Palangka Raya untuk memberikan aspirasinya.



Gambar 2. Seminar Awal Kajian dilaksanakan secara Hybrid di Aula Bappedalitbang Kota Palangka Raya dan Zoom Meeting, tanggal 21 Mei 2024

Hal ini menarik untuk dikaji lebih jauh, sebab keinginan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pemantapan pelayanan publik perlu didukung proses partisipasi publik yang efektif. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan kehadiran berbagai jenis media sosial dan aplikasi nasional untuk melakukan pengaduan seperti SP4N LAPOR! telah mengubah cara masyarakat dalam berpartisipasi. Pada titik ini, Pemerintah Kota Palangka Raya perlu mendapatkan masukan untuk optimalisasi e-government dalam hal fasilitasi partisipasi publik. Inovasi teknologi yang dapat memudahkan aspirasi masyarakat sangat diperlukan untuk optimalisasi pelaksanaan e-government. Dengan semakin optimalnya pelaksanaan e-government, diharapkan tata kelola pemerintahan Kota Palangka Raya akan semakin membaik dan berdampak pada semakin mantapnya kualitas pelayanan publik.

1.2. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Kajian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui seperti apa pengetahuan dan preferensi Pemerintah Kota Palangka Raya dan tingkat pengetahuan, preferensi, dan partisipasi warga kota Palangka Raya dalam hal partisipasi publik melalui e-government.

2) Tujuan

- a. Pendalaman terhadap pengetahuan dan preferensi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal partisipasi publik melalui e-government.
- b. Pengukuran terhadap tingkat pengetahuan, preferensi, dan partisipasi warga Kota Palangka Raya dalam hal partisipasi publik melalui e government.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Palangka Raya dan pihak terkait lainnya terkait penerapan/ pembangunan e-government untuk



Gambar 3. Focus Group Discussion di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tanggal 13 Agustus 2024

peningkatan kualitas pelayanan publik, utamanya dalam hal partisipasi publik melalui e-government.

1.3 Sasaran

Kajian Partisipasi Publik Dalam Penerapan /Pembangunan E-Government Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Pusat

Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tanggal 27 Maret s/d 27 September 2024 mencakup stakeholder Pemerintah Kota Palangka Raya dan warga Kota Palangka Raya.

Tenaga Ahli

Tenaga Ahli yang terlibat dalam Kajian ini berasal dari Pusat Riset Kebijakan



Gambar 3. Foto bersama setelah FGD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya



Gambar 4. Focus Group Discussion di Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, tanggal 14 Agustus 2024

Publik BRIN, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| 1. YANUAR FARIDA WISMAYANTI, S.ST.,
M.A., Ph.D. (Kepala Pusat Riset Kebijakan
Publik) | 3. AZWAR ASWIN, S.Sos., M.AP., M.Si.
(Peneliti Ahli Muda) |
| 2. MADYA PUTRA YAUMIL AHAD, S.IP.,
M.Si. (Peneliti Ahli Muda) | 4. RAHMAT HUSEIN ANDRI ANSYAH, M.Ag.
(Peneliti Ahli Muda) |
| | 5. ADHITYO NUGRAHA BARSEI, S.AP.
(Peneliti Ahli Pertama) |



Gambar 4. Foto bersama setelah pelaksanaan Focus Group Discussion di Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, tanggal 14 Agustus 2024



Gambar 5. Focus Group Discussion di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, tanggal 14 dan 15 Agustus 2024

Hasil Yang Dicapai

Perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya melalui penerapan teknologi digital, menjadi prioritas utama. Pemerintah Kota berusaha meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik dengan digitalisasi proses administrasi, pengembangan aplikasi pelayanan berbasis elektronik, dan pelatihan Aparatur Sipil

Negara (ASN). Meski ada peningkatan signifikan dalam indeks evaluasi tata kelola dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang pada tahun 2021 mencapai predikat "B" dan indeks SPBE 2,11, masih terdapat tantangan dalam hal integrasi sistem dan perluasan akses infrastruktur digital.



Gambar 5. Foto bersama setelah FGD di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

Kajian ini mengidentifikasi dua permasalahan utama: bagaimana Pemerintah Kota Palangka Raya memahami dan menerapkan partisipasi publik melalui e-government, serta tingkat pengetahuan, preferensi, dan partisipasi warga dalam menggunakan layanan digital tersebut. Tujuan kajian ini adalah untuk mengukur pengetahuan dan preferensi pemerintah dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

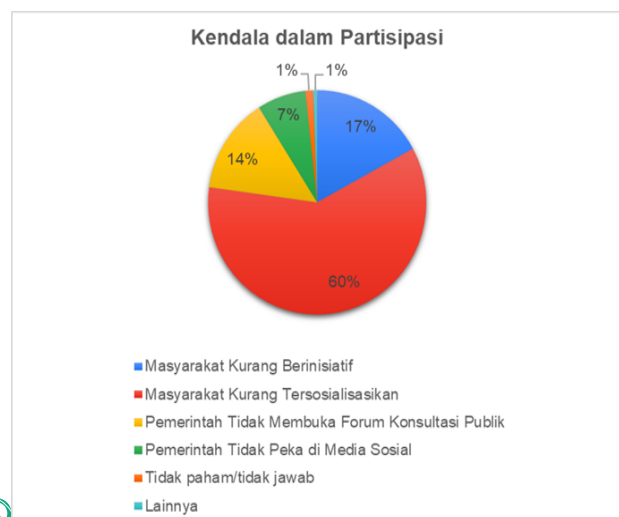
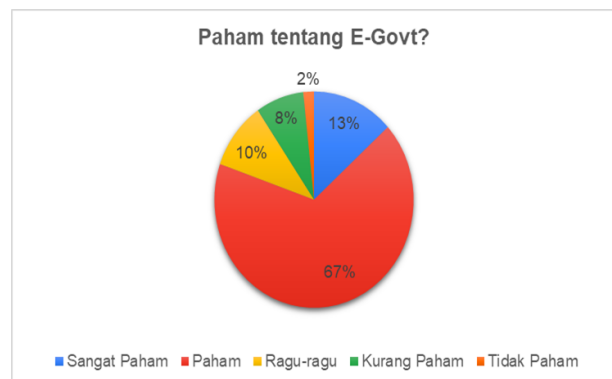
Sasaran kajian mencakup perangkat daerah dan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Dengan memahami penerapan teknologi oleh pemerintah dan pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan digital, kajian ini bertujuan memberikan dasar bagi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkelanjutan di Kota Palangka Raya.

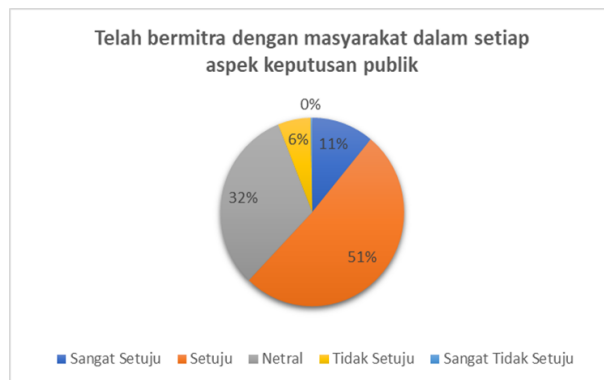
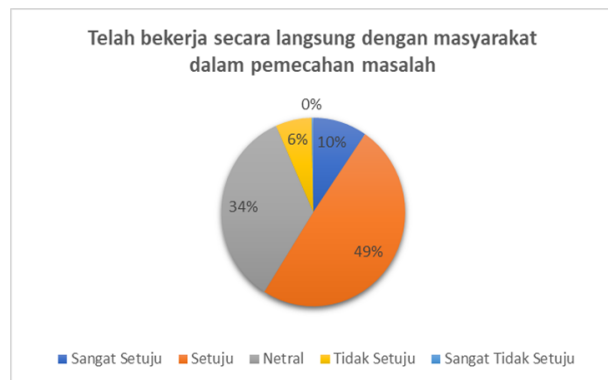
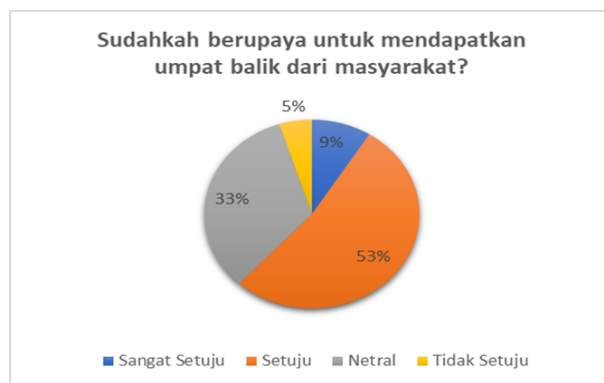
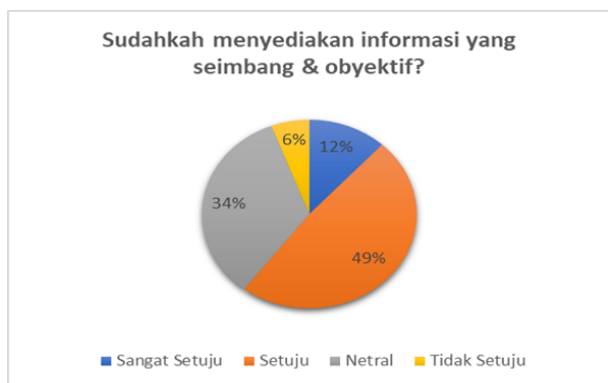
Dengan mengidentifikasi perangkat daerah dan masyarakat sebagai target kajian,

penelitian ini berfokus pada penerapan teknologi oleh pemerintah serta pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan digital. Hal ini menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif dalam rangka mewujudkan pelayanan publik berkelanjutan di Kota Palangka Raya. Untuk mendukung tujuan tersebut, laporan ini merangkum hasil survei yang mengeksplorasi pengetahuan, persepsi, dan preferensi masyarakat terhadap SPBE.

Survei melibatkan 346 responden yang dipilih secara representatif berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan usia. Sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan tinggi (57%) dan berasal dari generasi Milenial (39%) serta Gen X (30%), menunjukkan literasi yang memadai terhadap informasi digital dan SPBE.

Dari segi pengetahuan, 67% masyarakat memahami konsep e-government serta menyadari adanya





peluang partisipasi publik dalam program pemerintah, meski masih terdapat 10% yang ragu dan 8% yang kurang memahami konsep ini. Partisipasi masyarakat dalam perancangan e-government terbilang rendah, dengan 45% responden mengaku tidak pernah dilibatkan, sementara hanya 38% merasa pernah diminta masukan. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif dari pihak pemerintah.

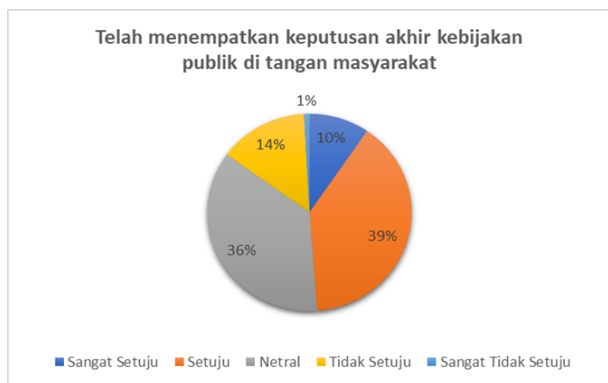
Kendala utama yang menghambat partisipasi publik adalah minimnya sosialisasi (60%), diikuti kurangnya inisiatif dari masyarakat (17%) serta ketiadaan forum konsultasi publik (14%). Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan pengembangan forum yang inklusif, serta interaksi digital yang lebih aktif antara pemerintah dan masyarakat.

Persepsi masyarakat terkait informasi yang disediakan oleh pemerintah cenderung positif, dengan 61% responden menilai informasi yang diberikan seimbang dan

objektif. Namun, masih terdapat 34% yang ragu mengenai transparansi informasi. Dalam aspek umpan balik, 62% responden mengakui adanya upaya pemerintah untuk memperoleh masukan dari masyarakat, namun mereka mencatat kekurangan dalam penyediaan forum diskusi online dan ruang untuk perumusan kebijakan berbasis digital.

Dalam hal kolaborasi dan pengambilan keputusan, 59% responden merasa pemerintah telah berkolaborasi dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah publik, meski pelibatan ini lebih terbatas pada individu daripada kelompok masyarakat yang lebih luas. Sebanyak 62% responden berpendapat bahwa pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sementara 32% masih ragu dan 6% merasa bahwa pelibatan tersebut belum optimal.

Secara keseluruhan, survei ini menyoroti perlunya peningkatan literasi digital, pelibatan publik yang lebih besar dalam perancangan e-government, serta

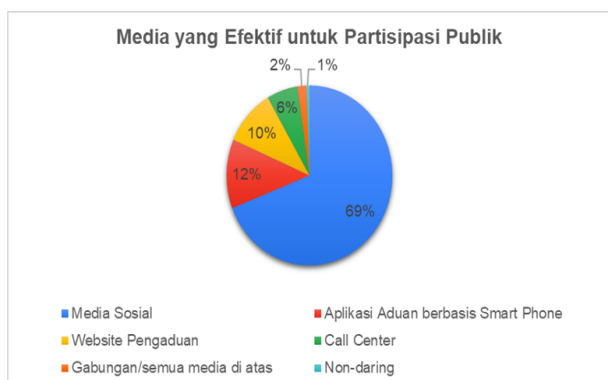
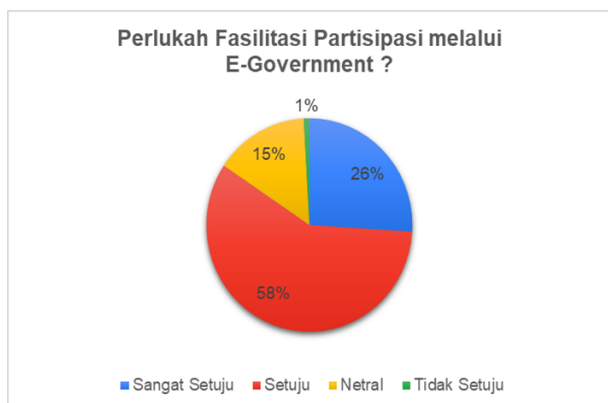


penguatan sosialisasi untuk memastikan partisipasi publik yang lebih inklusif dan efektif dalam implementasi SPBE di Kota Palangkaraya.

Dalam konteks ini, penting pula untuk mempertimbangkan perspektif Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya tersebut.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Palangka Raya telah mengadopsi pelayanan berbasis digital sejak tahun 2021 sebagai respons terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7

Tahun 2019, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan efisiensi layanan, terutama di tengah pandemi COVID-19. Inovasi ini diwujudkan melalui Sistem Informasi Dukcapil Olah Itah (SI-DOI), yang diluncurkan pada tahun 2022 dan telah menarik sekitar 70.000 pengguna hingga tahun 2024. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk melacak proses dan waktu penyelesaian layanan secara real-time. Meskipun layanan digital telah diperkenalkan, Dukcapil tetap menyediakan loket bagi masyarakat yang kesulitan mengakses teknologi, serta melakukan layanan jemput bola di daerah dengan jaringan internet terbatas, seperti Kecamatan Rakumpit, berkolaborasi dengan pegawai kelurahan. Dukcapil juga memfasilitasi akses gratis Wi-Fi untuk masyarakat yang baru pertama kali mendaftar di SI-DOI, didukung dengan





Gambar 10. Seminar Akhir Kajian di Aula Palampang Tarung dipimpin oleh Asisten III Sekda Kota Palangka Raya, tanggal 19 Agustus 2024

petugas khusus yang membantu pembuatan akun dan menjelaskan layanan yang ada.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang SI-DOI, Dukcapil mengadakan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta penggiat media sosial. Dukcapil menekankan pentingnya menerima aspirasi, pengaduan, dan masukan dari masyarakat untuk perbaikan layanan, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan. Meskipun upaya ini telah dilakukan, Dukcapil menyadari perlunya forum khusus untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, mengingat keterlibatan publik saat ini hanya diwakili oleh tokoh masyarakat yang diundang.

Kendala yang dihadapi Dukcapil berkaitan dengan perubahan pola pikir di internal dan eksternal. Transformasi budaya kerja menjadi tantangan dalam mengimplementasikan layanan digital, mengingat pegawai sebelumnya berada

dalam zona nyaman. Namun, dengan komitmen dan aspirasi masyarakat yang mendukung perbaikan, perubahan budaya kerja secara bertahap berhasil diterapkan. Di sisi lain, beberapa masyarakat merasa bahwa pelayanan digital menyulitkan mereka, meskipun secara umum literasi digital di Palangka Raya dianggap sudah baik namun masih perlu ditingkatkan di kalangan kelompok usia tertentu.

Dari segi preferensi, Dukcapil tidak hanya berfokus pada layanan digital, tetapi juga tetap menyediakan layanan tatap muka bagi masyarakat yang belum familiar dengan teknologi. Dukcapil menganggap media sosial sebagai saluran efektif untuk menyampaikan dan menerima aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, Instagram lebih digunakan untuk pengaduan, sementara Facebook dan WhatsApp digunakan untuk permintaan informasi layanan kependudukan. Dukcapil berharap dapat meningkatkan layanan agar menjangkau daerah yang selama ini belum terlayani, dengan bekerja sama dengan Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo), serta penyedia jaringan untuk memperluas akses digital.

Di sisi lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya juga telah melakukan transformasi digital dengan menerapkan layanan Online Single Submission (OSS) dan SIMYANDU sejak tahun 2017. DPMPTSP berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung penerapan e-government di Kota Palangka Raya. Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir dalam layanan OSS, antrian panjang, serta tuntutan untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Untuk mengatasi hal ini, DPMPTSP menyediakan 37 jenis layanan perizinan dan non-perizinan, serta memahami pentingnya keamanan data elektronik.

Dalam perspektif partisipasi publik, DPMPTSP berupaya memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan legalitas. Mereka menyediakan saluran aspirasi melalui WhatsApp, email, LAPOR!, call center, dan aplikasi. Penerapan e-government di DPMPTSP mencakup pengurusan pelayanan perizinan dan non-perizinan dengan memanfaatkan OSS dan SIMYANDU, serta informasi mengenai jenis layanan dan persyaratannya. Meski begitu, informasi tentang potensi dan peluang investasi secara digital belum dioptimalkan. Sementara itu, Diskominfo memiliki tugas untuk mendukung Walikota dalam bidang komunikasi dan informasi. Diskominfo

menyelenggarakan beberapa platform komunikasi publik seperti SP4N LAPOR! untuk menerima laporan dan aspirasi masyarakat, Call Center 112 untuk laporan mendesak, serta media sosial untuk menyebarkan informasi terkini. Selain itu, Diskominfo juga mengelola layanan informasi publik dan data terintegrasi melalui Palangka Raya Satu Data (Pasada). Dengan berbagai inisiatif tersebut, Diskominfo berupaya untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi informasi di Kota Palangka Raya.

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa Kota Palangka Raya, dengan keberagaman karakteristik wajahnya—perkotaan, perdesaan, dan hutan—membutuhkan pendekatan yang holistik dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfokus pada pemantapan pelayanan publik dan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Hasil survei menunjukkan bahwa, meskipun mayoritas masyarakat memahami e-government, partisipasi publik dalam perancangan dan pengambilan keputusan masih rendah. Sosialisasi yang minim dan kurangnya forum konsultasi publik menjadi kendala utama. Dengan mengidentifikasi perangkat daerah dan masyarakat sebagai target utama kajian, upaya untuk meningkatkan literasi digital dan partisipasi publik dapat dioptimalkan.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, untuk mengoptimalkan penerapan e-government dan meningkatkan partisipasi

publik secara efektif, beberapa rekomendasi strategis perlu diterapkan. Pertama, dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), penting untuk menumbuhkan growth mindset dan meningkatkan kemampuan teknis pegawai melalui pelatihan intensif serta rekrutmen tenaga ahli IT, guna memastikan pegawai dapat beradaptasi dengan teknologi terbaru. Kedua, infrastruktur digital harus diperkuat dengan berkonsultasi dengan BAKTI Kominfo mengenai Menara Telekomunikasi dan melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk integrasi data yang efisien. Ketiga, kolaborasi antara OPD dan masyarakat perlu diperkuat melalui pertemuan dan pembentukan tim yang memonitor media sosial untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat. Selanjutnya, pengembangan aplikasi harus fokus pada peningkatan antarmuka pengguna (UI/UX) dan pengoptimalan platform Command Center untuk menyajikan data kinerja OPD secara real-time. Optimalisasi partisipasi publik melalui Forum

Konsultasi Publik digital juga harus diprioritaskan agar masyarakat dapat memberikan masukan dan terlibat dalam pengambilan keputusan, dengan transparansi yang ditingkatkan melalui media sosial. Terakhir, alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mendukung infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengembangan sistem, dan peningkatan SDM, guna memastikan implementasi e-government yang efektif dan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan publik berbasis digital.

Akhirnya, untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkelanjutan di Kota Palangka Raya, diperlukan komitmen yang konsisten dari Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyusun kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperkuat sosialisasi untuk memastikan partisipasi publik yang lebih luas dan efektif dalam implementasi e-government.

* * *



Gambar 10. Foto bersama setelah pelaksanaan Seminar Akhir Kajian di Aula Palampang Tarung dipimpin oleh Asisten III Sekda Kota Palangka Raya, tanggal 19 Agustus 2024



Oleh:

Oleh: Roysart Alfons, ST, MT, MSc

(Analisis Pemanfaatan Iptek pada Bappedalitbang Kota Palangka Raya)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya melaksanakan acara Seminar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bertempat di Hotel Aurila Palangka Raya, pada tanggal 20

November 2022. Narasumber pada acara ini berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dengan topik yang dipaparkan adalah: (1) Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia, (2) Pendaftaran/Pencatatan Kekayaan Intelektual Bagi Aparatur Sipil

Negara. Artikel ini membahas pemaparan yang disampaikan oleh kedua narasumber.

Kekayaan intelektual mencakup hasil pemikiran manusia seperti penemuan, karya seni dan sastra, desain, serta simbol, nama, atau gambar yang digunakan dalam perdagangan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dijamin oleh hukum melalui perlindungan seperti paten, hak cipta, dan merek dagang, yang memberi pengakuan atau keuntungan finansial kepada pencipta atau pemilik hak. Pelanggaran terhadap HKI dapat dikenai sanksi hukum sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap pemilik hak tersebut.

Dasar Hukum Kekayaan Intelektual

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Manfaat Perlindungan KI

1. Perlindungan Hukum: Pemilik hak dapat mengontrol penggunaan karya mereka dan mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran.
2. Mendorong Inovasi dan Kreativitas: Perlindungan mendorong individu dan organisasi untuk menciptakan produk atau karya baru dengan manfaat ekonomi.
3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi: HKI menjadi aset strategis yang meningkatkan daya saing di pasar global.

4. Akses dan Kemanfaatan Sosial: Hasil inovasi, seperti paten, dapat digunakan untuk kepentingan umum.

Peran Kekayaan Intelektual dalam Perekonomian Nasional

1. Memberikan Insentif

Kekayaan intelektual memberikan dorongan kepada pencipta, pemilik KI, lembaga penelitian, perguruan tinggi, asosiasi, dan pelaku usaha untuk terus menciptakan dan mengembangkan inovasi baru berkat perlindungan hak eksklusif.

2. Mendorong Investasi

Perlindungan kekayaan intelektual mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, sehingga memacu lahirnya inovasi yang lebih maju.

3. Mendukung Transfer Teknologi

Melalui sistem paten dan lisensi, kekayaan intelektual memungkinkan teknologi dan inovasi tersebar lebih luas, mempercepat proses transfer pengetahuan.

4. Mendorong Kompetisi Sehat

Perlindungan terhadap merek dagang dan rahasia dagang membantu menciptakan persaingan yang adil di pasar.



Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



5. Melestarikan Pengetahuan Tradisional
Kekayaan intelektual juga mencakup perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan budaya masyarakat, menjaga nilai-nilai lokal agar tetap lestari.

6. Meningkatkan Akses Informasi
Hak cipta dan lisensi memberikan peluang akses lebih luas ke hasil karya intelektual, sehingga memperkaya masyarakat dengan keragaman budaya dan ide-ide baru.

Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual

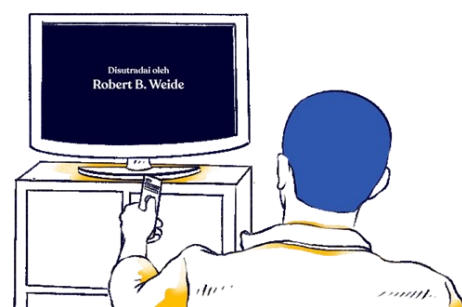
Perlindungan Kekayaan Intelektual diberikan dalam bentuk perlindungan:

- ◆ Hak Cipta
- ◆ Merek
- ◆ Desain Industri
- ◆ Paten
- ◆ Indikasi Geografis
- ◆ Kekayaan Intelektual Komunal
- ◆ Rahasia Dagang

Apa Itu Hak Cipta?

Hak cipta adalah hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis begitu karya mereka diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Hak ini terdiri dari dua jenis, yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi.

Hak moral adalah hak pencipta untuk disebutkan namanya ketika karyanya digunakan oleh pihak lain. Hak ini tidak dapat dihilangkan dan selalu melekat pada pencipta. Selain itu, hak moral juga memungkinkan pencipta melarang perubahan pada karyanya, seperti mengubah lirik atau aransemen lagu.



Credit scene mencantumkan nama-nama orang dan kru yang terlibat dalam pembuatan film sebagai bentuk hak moral.



Hak ekonomi memberikan pencipta hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penggunaan karyanya. Contoh manfaat ekonomi ini termasuk hasil dari penggandaan atau adaptasi karya ke dalam bentuk lain.

Jenis-Jenis karya yang dilindungi Hak Cipta:

1. Buku, program komputer, pamflet, tata letak karya tulis, dan karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan karya sejenis.
3. Alat peraga untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
6. Seni rupa seperti lukisan, ukiran, patung, kaligrafi, seni terapan, dan lainnya.

7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni batik.
10. Fotografi.
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain hasil pengalihwujudan.

Durasi Perlindungan Hak Cipta

- ✓ Seumur hidup + 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia: untuk karya seperti buku, lagu, musik, seni rupa, drama, peta, dan sejenisnya.
- ✓ 50 tahun sejak publikasi pertama: untuk fotografi, sinematografi, program komputer, terjemahan, adaptasi, atau modifikasi karya lain.
- ✓ 25 tahun sejak publikasi pertama: untuk seni terapan.

Langkah Penting bagi Pencipta

Sebagai kreator, dokumentasikan karya Anda untuk membuktikan bahwa Anda adalah pemilik asli. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan karya di media sosial atau di situs portofolio. Jika karya Anda digunakan tanpa izin, tegur pelanggar atau laporkan ke Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui: <https://pengaduan.dgip.go.id>.

Biaya Permohonan Pencatatan Hak Cipta

Pemohon	Ciptaan Non Software	Ciptaan Software
UMK, Biaya Pendidikan dan Litbang Pemerintah	Rp 200.000/pencatatan	Rp 300.000/pencatatan
Umum	Rp 400.000/pencatatan	Rp 600.000/pencatatan

Apa Itu Merek?

Merek adalah suatu tanda yang digunakan untuk membedakan produk barang atau jasa. Tanda ini dapat berupa kata, logo, suara, bentuk tiga dimensi, atau hologram. Perlindungan terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam dunia usaha, merek berfungsi sebagai identitas unik yang membedakan produk Anda dari produk lain. Selain menjadi identitas, merek juga mencerminkan jaminan mutu atas produk, sehingga sangat penting untuk dilindungi.

Perlindungan Merek

Merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran

dan dapat diperpanjang. Sertifikat merek menjadi bukti sah kepemilikan, memberikan pemilik hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek tanpa izin.

Jika terjadi pelanggaran terhadap merek terdaftar, pemilik dapat:

1. Menegur pelanggar secara langsung.
2. Melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di [pengaduan.dgip.go.id] (<http://pengaduan.dgip.go.id>).

Untuk konsumen yang dirugikan akibat barang palsu (KW), Anda dapat melaporkannya ke pemilik merek atau ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Alasan Penolakan Pendaftaran Merek

Merek dapat ditolak pendaftarannya apabila:

Merek Tradisional

Merek Kata



Merek Gambar



Merek Kombinasi



Merek yang paling sering kita temui biasanya berupa kata, gambar, logo, atau kombinasinya. Merek seperti ini biasa disebut dengan "merek tradisional".

Merek Non-Tradisional

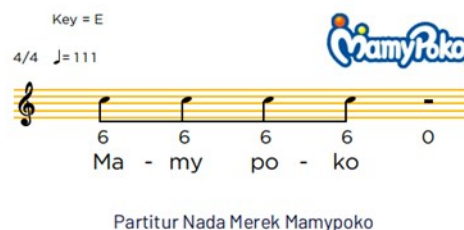
Merek 3 Dimensi



Merek Hologram



Merek Suara



Seiring dengan berkembangnya jaman, merek atau tanda pembeda suatu produk makin beragam. Tak hanya kata atau gambar, tapi juga bisa berupa bentuk 3 dimensi, hologram, bahkan suara

1. Tidak Memenuhi Kriteria Merek: Tidak sesuai definisi merek yang diatur dalam hukum.
2. Kurangnya Daya Pembeda: Tidak cukup unik untuk membedakan produk dari yang lain.
3. Kesamaan dengan Merek Terdaftar: Merek memiliki kemiripan dengan merek yang sudah dilindungi.
4. Mengandung Unsur yang Dilarang: Tanda yang melanggar aturan hukum atau norma masyarakat.
5. Kekurangan Administrasi: Dokumen tidak lengkap atau penyalahgunaan sistem pendaftaran.
6. Menggunakan Nama Generik: Merek bersifat umum dan tidak spesifik.
7. Menyesatkan Konsumen: Merek dapat menciptakan persepsi yang salah terhadap produk.

Pengajuan pendaftaran merek dapat dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu:

1. Mandiri secara online. Pemohon membuat akun dan mendaftar secara mandiri pada system permohonan Kekayaan Intelektual.

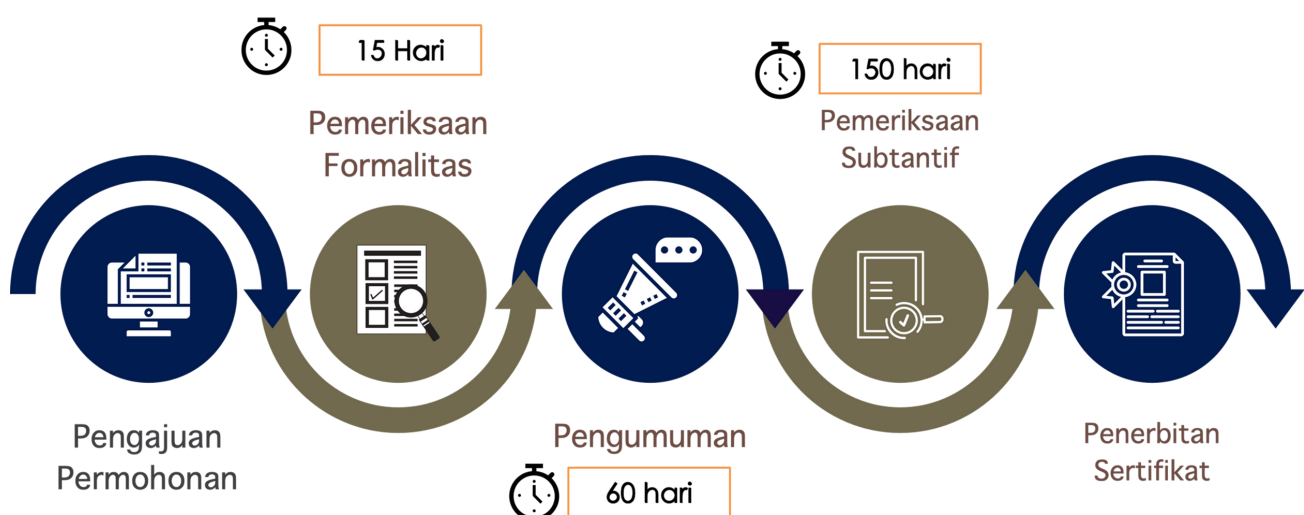
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di 33 Provinsi di Inonesia
3. Sentra Kekayaan Intelektual, LPPM Universitas dan Lembaga Pendidikan
4. Konsultan, yaitu melalui kuasanya yang ditunjuk, dengan tambahan biaya jasa.

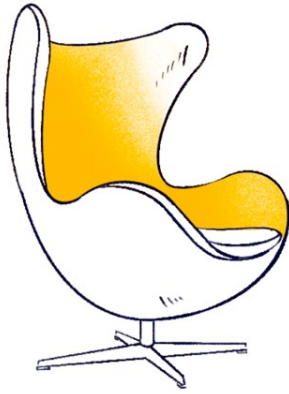
Perlindungan Desain Industri

Desain industri merupakan hasil kreasi berupa bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna yang memberikan nilai estetis pada produk, barang industri, atau kerajinan tangan. Desain ini dapat diwujudkan dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi. Aturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

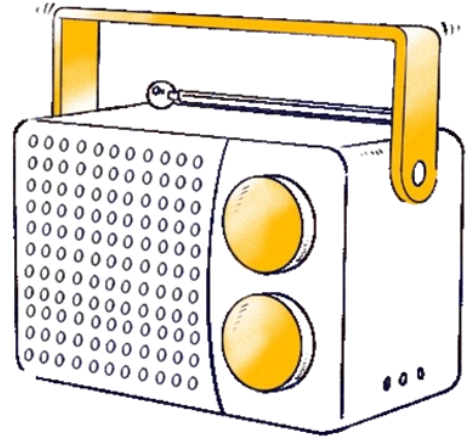
Desain yang dilindungi dapat mencakup desain tunggal, seperti desain motor atau tas, serta desain dalam satu set, misalnya meja dan kursi atau peralatan makan. Bentuk desain adalah tampilan tiga dimensi dari wujud produk secara keseluruhan, seperti pada contoh Radio Magno Ikono karya Singgih S. Kartono.

Prosedur dan Lama Waktu Pendaftaran Merek





Apa yang membedakan kedua kursi ini?
Mungkin banyak yang berpendapat bahwa bentuk kursi yang sebelah kiri lebih estetik atau bentuknya lebih menarik.



Bentuk adalah tampilan tiga dimensi berupa wujud produk secara keseluruhan. Misalnya bentuk Radio Magno Ikono karya Singgih S. Kartono ini.

Perlindungan Desain Industri

Agar mendapatkan perlindungan hukum, desain industri wajib didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Setelah terdaftar, desain tersebut akan dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran dan tidak dapat diperpanjang.

Sertifikat desain industri menjadi bukti resmi kepemilikan dan memberi hak kepada pemilik untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang menggunakan desain tanpa izin. Jika ada pelanggaran, pemilik dapat:

1. Menegur pihak yang melanggar.
2. Melaporkan kasus ke Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui Ditjen Kekayaan Intelektual di (<http://pengaduan.dgip.go.id>).

Perlindungan ini membantu memastikan desain industri tetap eksklusif bagi pemiliknya.

Apa Itu Paten?

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas invensinya di bidang teknologi. Contoh invensi seperti

sedotan fleksibel dan sepeda lipat menunjukkan bagaimana ide-ide baru dapat memecahkan masalah dan memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Proses menciptakan sesuatu yang benar-benar baru ini disebut invensi.

Dasar hukum paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Tidak semua invensi dapat dipatenkan; ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Nilai Kebaruan: Invensi harus benar-benar baru atau merupakan pengembangan teknologi sebelumnya.
2. Langkah Inventif: Proses penciptaannya harus menunjukkan inovasi yang signifikan dibandingkan penemuan sebelumnya.
3. Berbeda dengan Penemuan (*Discovery*): Invensi adalah hasil proses menciptakan sesuatu yang baru, seperti vaksin COVID-19 atau teknologi kereta cepat. Sebaliknya, penemuan (*discovery*) adalah pengungkapan sesuatu yang sudah ada di alam, seperti spesies binatang atau mineral.

4. Dapat Diterapkan Secara Industri: Invensi harus mampu diaplikasikan dalam industri.
5. Produksi Massal: Invensi harus dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan kualitas konsisten.

Contoh Invensi yang Dipatenkan

1. Mesin Cetak Braille

Dikembangkan oleh Dr. Tri Arief Sardjono dan tim dari Institut Teknologi Surabaya, mesin ini dipatenkan pada 2016. Keunggulannya meliputi kemudahan penggunaan, konsumsi daya listrik rendah, dan kemampuan mencetak hingga 1200 halaman per jam, jauh lebih cepat dibandingkan mesin braille lainnya.

2. Tongkat Kartu Tol

Invensi sederhana yang memudahkan pengemudi dalam menempelkan kartu di pintu tol, tanpa perlu mempersulit jarak antara mobil dan mesin kartu.

Perlindungan Paten

Agar dilindungi secara hukum, paten harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum berlangsung:

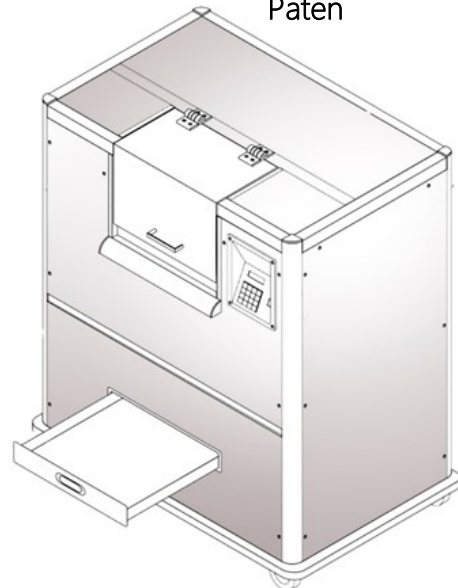
- 20 tahun untuk paten biasa.
- 10 tahun untuk paten sederhana.

Sertifikat paten menjadi bukti kepemilikan resmi, memberikan hak kepada pemilik untuk melarang penggunaan invensi tanpa izin. Jika terjadi pelanggaran, pemilik dapat:

1. Menegur pelanggar.
2. Melaporkan kasus ke Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui Ditjen Kekayaan Intelektual di <https://pengaduan.dgip.go.id>.

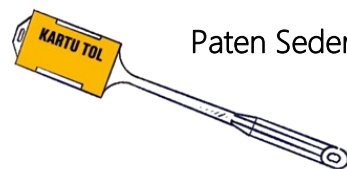
Perlindungan ini memastikan bahwa

Paten



Mesin Cetak Braille

Inventor Dr. Tri Arief Sardjono, S.T., M.T., Dr. Ir. Hendra Kusuma M.Eng., dan Ir. Tasripan MT. dari Institut Teknologi Surabaya. Mesin cetak braille ini dilindungi patennya sejak tahun 2016. Mesin braille buatan Indonesia ini memiliki beberapa keunggulan daripada mesin braille buatan luar negeri sebelumnya, yakni lebih mudah dioperasikan serta hemat energi karena berdaya listrik rendah. Selain itu, mesin ini memiliki kecepatan mencetak yang tinggi dengan kemampuan menghasilkan 400 karakter per detik atau 1200 halaman per jam.



Paten Sederhana



Tongkat kartu tol adalah salah satu invensi sederhana yang sangat memudahkan orang ketika menempelkan kartu di pintu tol. Tanpa tongkat ini, pengemudi akan kesulitan memperkirakan jarak mobil dan mesin kartu agar bisa dijangkau dengan tangan.

hak penemu dihormati dan inovasi mereka tetap eksklusif.

Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah tanda yang

menunjukkan asal suatu barang atau produk

Prosedur Pendaftaran Paten



dari wilayah tertentu yang memiliki karakteristik unik. Keunikan ini muncul karena faktor lingkungan geografis, baik yang bersifat alami, manusiawi, maupun kombinasi keduanya, sehingga memberikan reputasi, kualitas, dan sifat khusus pada produk tersebut. Tanda ini dapat berupa label atau etiket yang dilekatkan pada barang, dan dapat menggunakan nama tempat, wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut.

Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Indikasi Geografis

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat diajukan oleh:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu, yang memproduksi barang berupa:
 - Sumber daya alam.
 - Barang kerajinan tangan.
 - Hasil industri.
2. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.



Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Palangka Raya Bersama Para Narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah



Foto bersama seluruh peserta Seminar dan Narasumber



Pemantasan Sanggar Seni Tunjung Nyaho Palangka Raya menyambut peserta Seminar

Pihak yang menggunakan Indikasi Geografis adalah mereka yang mendapatkan izin dari pemegang hak untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang tersebut.

Perlindungan Indikasi Geografis

Indikasi Geografis mendapat perlindungan hukum sebagai tanda asal barang yang memiliki ciri dan kualitas khusus karena pengaruh lingkungan geografis.

Seperti halnya merek, perlindungan IG juga membutuhkan proses pendaftaran, namun pendaftaran ini dilakukan oleh kelompok masyarakat atau institusi terkait.

Berbeda dengan merek, IG tidak memiliki batas waktu perlindungan selama karakteristik unggulannya tetap terjaga. Aturan mengenai perlindungan IG dijelaskan lebih rinci dalam PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis.



Sesi Tanya Jawab dipandu oleh moderator Hadi Cahyadi, S.H. dari Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah

Contoh Indikasi Geografis di Kalimantan Tengah:

Salah satu produk yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis dari Kalimantan Tengah adalah Beras Siam Epang Sampit. Saat ini, terdapat tiga Indikasi Geografis lain di wilayah ini yang sedang dalam tahap verifikasi pendaftaran.

Pengertian Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) mengacu pada hak-hak kekayaan intelektual yang dimiliki secara kolektif oleh suatu komunitas atau kelompok, bukan individu tertentu. KIK meliputi



Atraksi dalam penampilan Sanggar Seni Tunjung Nyaho Palangka Raya



Penyerahan Sertifikat Hak Cipta a.n. KURNIAWAN SATRIA UTAMA berjudul *Assessment of Waste Management Policy Strategy in Palangka Raya*. Pendaftaran Hak Cipta pada saat Seminar dan langsung diserahkan kepada Pemegang Hak Cipta.

berbagai pengetahuan, budaya, seni, dan inovasi yang berkembang dalam komunitas tersebut dan bernilai bagi seluruh anggota kelompok. Konsep ini penting untuk melestarikan serta memanfaatkan pengetahuan dan budaya tradisional yang tidak selalu dilindungi oleh sistem kekayaan intelektual konvensional seperti hak cipta atau paten. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022.

Aspek Kekayaan Intelektual Komunal

1. Ekspresi Budaya Tradisional: Bentuk karya cipta, baik benda maupun tak benda, yang mencerminkan budaya tradisional dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas.

2. Indikasi Geografis: Tanda yang menunjukkan asal geografis suatu produk yang memiliki reputasi, kualitas, atau karakteristik tertentu karena pengaruh lingkungan alam atau manusia di wilayah tersebut.
3. Pengetahuan Tradisional: Hasil intelektual dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang memiliki unsur warisan tradisional dan dikelola oleh suatu komunitas.
4. Sumber Daya Genetik: Bahan biologis seperti tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang memiliki nilai nyata atau potensial.

Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal

1. Inventarisasi KIK: Pemerintah melakukan pencatatan untuk melindungi KIK secara



Sambutan Wali Kota Palangka Raya yang disampaikan oleh Asisten III Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya sekaligus membuka pelaksanaan Seminar



Laporan Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya disampaikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

defensif, meskipun KIK tidak selalu memenuhi kriteria kebaruan. KIK dianggap sebagai hasil pemikiran masyarakat adat yang bertahan lama dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

2. Perlindungan Internasional: Organisasi seperti UNESCO dan WIPO menyediakan

prinsip dan instrumen hukum untuk melindungi KIK.

3. Hak Kolektif: Memberikan pengakuan terhadap hak komunitas atas pengetahuan dan budaya, termasuk pengakuan atas indikasi geografis dan pengetahuan tradisional.

KIK di Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah memiliki beragam budaya dari suku Dayak, Banjar, dan Melayu yang mencerminkan kekayaan tradisi, kepercayaan, dan hubungan masyarakat dengan alam. Ekspresi budaya yang masih hidup meliputi seni pertunjukan, kerajinan tangan, upacara adat, serta sistem kepercayaan yang diwariskan turun-temurun.

Pengetahuan Tradisional di Kalimantan Tengah

Pengetahuan tradisional memainkan peran penting dalam pelestarian budaya, keberlanjutan lingkungan, dan menjadi dasar pembangunan berkelanjutan.

Proses Pencatatan KIK di Kalimantan Tengah

Pendaftaran KIK membutuhkan waktu yang bervariasi, tergantung pada jenis KIK, proses verifikasi, konsultasi dengan komunitas, dan kesiapan infrastruktur hukum.

Persyaratan dan Alur Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal

Persyaratan administratif terhadap permohonan pencatatan KIK paling sedikit meliputi:

1. Formulir permohonan pencatatan;
2. Deskripsi;
3. Data dukung : Link Video, Dokumentasi, Proses/ Teknik kecakapan atau Teknik membuat
4. Pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah, Perkumpulan masyarakat adat, Paguyuban.

Pendaftaran dan Perlindungan Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh publik. Informasi ini tetap dijaga kerahasiaannya oleh pemilik karena penting untuk kegiatan usaha. Perlindungan Rahasia Dagang



Peserta Seminar dari Perangkat Daerah dan Kelurahan di Kota Palangka Raya



Sesi Presentasi oleh Narasumber

mencakup metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain di sektor teknologi dan bisnis yang bernilai ekonomi serta tidak diketahui secara umum.

Bagaimana Pelanggaran Rahasia Dagang Terjadi?

Pelanggaran Rahasia Dagang dapat terjadi apabila:

1. Seseorang dengan sengaja membocorkan Rahasia Dagang, melanggar perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya.
2. Seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang

melanggar hukum atau peraturan yang berlaku.

Contoh Rahasia Dagang di Indonesia

Sebagai ilustrasi, jika Anda memiliki restoran ayam geprek dengan resep dan SOP (Standar Operasional Prosedur) unik yang menjadi rahasia usaha, itu termasuk Rahasia Dagang. Apabila ada pihak yang ingin bermitra dan membuka cabang baru, mereka mungkin akan meminta akses ke resep atau prosedur tersebut. Jika Rahasia Dagang Anda telah didaftarkan di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), Anda dapat memberikan izin lisensi secara

tertulis tanpa khawatir rahasia usaha Anda disalahgunakan.

Tantangan dan Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual

Melindungi kekayaan intelektual adalah langkah strategis untuk mendorong inovasi, melindungi karya pencipta, dan memastikan persaingan usaha yang adil.

Tantangan Dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektual

- ⇒ Kurangnya pemahaman ASN terkait prosedur dan pentingnya HKI.
- ⇒ Minimnya tenaga ahli atau operator pendamping di instansi pemerintahan.
- ⇒ Potensi sengketa HKI jika tidak ada kejelasan terkait hak moral dan hak ekonomi

Peluang

- ✓ Mendorong inovasi dan kreativitas ASN untuk menghasilkan karya dan inovasi baru.
- ✓ Mendukung pembangunan nasional melalui kontribusi teknologi dan karya intelektual.
- ✓ Memanfaatkan HKI sebagai aset strategis dalam pelayanan publik dan kebijakan pemerintah.

Saran

- ♦ Perlu adanya penyuluh HKI di setiap instansi untuk memberikan edukasi dan panduan.
- ♦ Setiap instansi harus memiliki operator terlatih untuk mendampingi proses pendaftaran HKI.
- ♦ Meningkatkan kerjasama antarinstansi

untuk mempermudah pencatatan dan pengelolaan HKI.

Pernyataan Penutup dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Muhamad Mufid, S.Ag., M.Si., M.H., menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual sangat penting untuk memacu inovasi, menjaga hak pencipta, dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan regulasi yang kokoh serta kesadaran masyarakat yang meningkat, perlindungan ini diharapkan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan budaya di Indonesia.

Referensi:

1. Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia, Muhamad Mufid, S.Ag., M.Si., M.H., disampaikan pada dalam Seminar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Hotel Aurila Palangka Raya tanggal 20 November 2024
2. Pendaftaran/Pencatatan Kekayaan Intelektual Bagi Aparatur Sipil Negara, Dr. LAILA RAHMAWATI, S.H., M.H., disampaikan pada dalam Seminar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Hotel Aurila Palangka Raya tanggal 20 November 2024

* * *

Halaman Unduh

Buletin Litbang edisi sebelumnya dapat diunduh di sini: <https://s.id/BuLitbang> atau scan QR code ini



Edisi 05/Tahun III/2022



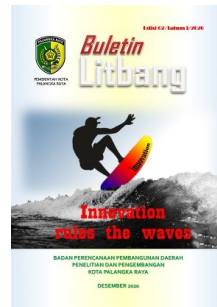
Edisi 04/Tahun II/2021



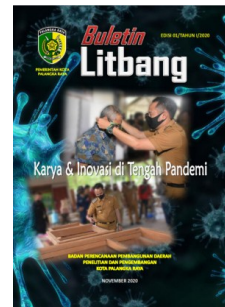
Edisi 03/Tahun II/2021



Edisi 02/Tahun I/2020



Edisi 01/Tahun I/2020



Edisi 09/Tahun V/2024



Edisi 08/Tahun IV/2023



Edisi 07/Tahun IV/2023



Edisi 06/Tahun III/2022



